

LAPORAN EVALUASI RKPD TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2025 KABUPATEN KUNINGAN



BAPPEDA
KABUPATEN KUNINGAN
2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas perkenanNya penyusunan dokumen Triwulan I (Satu) Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU-SPPN) Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa salah satu tahap yang harus dilalui dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah adalah Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Evaluasi rencana kerja pemerintah daerah diperlukan untuk mengetahui kemajuan, pencapaian hasil dan kendala dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga dapat dijadikan untuk perbaikan rencana pembangunan pada masa mendatang. Kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap rencana pembangunan daerah. Bupati melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup kabupaten, meliputi evaluasi terhadap: (1) kebijakan perencanaan pembangunan daerah; (2) pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan (3) hasil rencana pembangunan daerah.

Demikian Dokumen Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Triwulan I (Satu) Tahun 2025 ini kami susun, kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan Dokumen ini, Kami sampaikan terima kasih.

Kuningan, April 2025



DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan	I-3
1.4 Sistematika Penyajian Laporan	I-3
 BAB II PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA	 II-1
2.1 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah.....	II-1
2.2 Tujuan dan Sasaran Kabupaten/Kota	II-3
2.3 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024	II-5
2.4 Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2024	II-6
 BAB III CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023.....	 III-1
3.1 Capaian Kinerja Sasaran	III-1
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-8
3.3 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan	III-9
3.4 Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Pencapaian Prioritas Pembangunan Provinsi dan Nasional	 III-16
 BAB IV FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA	 IV-1
4.1 Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Kinerja	IV-1
4.2 Tindak Lanjut Bagi Pelaksanaan Triwulan/RKPD Berikutnya	IV-1
 BAB V PENUTUP	 V-1
5.1 Kesimpulan	V-1
5.2 Rekomendasi	V-1
 LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara umum, pelaksanaan pembangunan melalui tiga tahapan, yaitu perencanaan pembangunan, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, serta monitoring dan evaluasi pembangunan. Ketiga tahapan tersebut memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kualitas pembangunan yang dilaksanakan. Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Proses pelaksanaan pembangunan daerah melibatkan pemerintah daerah, badan hukum swasta, dan masyarakat sebagai pelaku pembangunan daerah.

Evaluasi pembangunan diperlukan untuk mengetahui kemajuan, pencapaian hasil dan kendala dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga dapat dijadikan untuk perbaikan rencana pembangunan pada masa mendatang. Kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap rencana pembangunan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Damanatkan bahwa Bupati/Walikota melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup kabupaten/kota, meliputi evaluasi terhadap: (1) kebijakan perencanaan pembangunan daerah; (2) pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan (3) hasil rencana pembangunan daerah.

Dijelaskan lebih lanjut bahwa evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah oleh Bupati/Walikota dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah, dan oleh Kepala SKPD untuk capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah periode sebelumnya. Evaluasi oleh Bappeda meliputi: (1) penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan (2) menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi Kepala Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah. Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

Evaluasi terhadap hasil pembangunan mencakup capaian berbagai target indikator yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Gubernur/Bupati/Walikota wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RKPD Tahun 2025. Dengan demikian seluruh pemerintah kabupaten/kota berkewajiban melakukan evaluasi RKPD Tahun 2025.

Dalam rangka menjalankan amanat tersebut, sekaligus untuk mengetahui seberapa jauh capaian target pembangunan yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025, dan sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan tahun berikutnya, maka perlu dilakukan evaluasi RKPD Kabupaten Kuningan tahun 2025.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Bupati Kabupaaten Kuningan Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026;
5. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 09 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2025;
6. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 368 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kuningan Tahun 2024.

1.2. Maksud

Maksud kegiatan Evaluasi RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2025 adalah untuk menilai dan mengevaluasi terhadap pencapaian target-target

rencana program dan kegiatan prioritas daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Tahun 2025.

1.3. Tujuan

Adapun tujuan kegiatan Evaluasi RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2025 adalah:

1. Memberikan gambaran realisasi capaian kinerja rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang telah ditargetkan dalam RKPD Tahun 2025;
2. Memberikan gambaran realisasi penyerapan dana kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam APBD Tahun 2025;
3. Mengetahui hambatan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

1.4. Sistematika Penyajian Laporan

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyajian Laporan

Bab II Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota

- 2.1. Strategi Dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
- 2.2 Tujuan dan Sasaran Kabupaten/Kota
- 2.3. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025
- 2.4. Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2025

Bab III Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2025

- 3.1. Capaian Kinerja Sasaran
- 3.2. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (dilengkapi dengan tabel Evaluasi Hasil RKPD)
- 3.3. Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Pencapaian Prioritas Pembangunan Provinsi dan Nasional

Bab IV Faktor Pendorong Dan Penghambat Pencapaian Kinerja

- 4.1. Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Kinerja
- 4.2. Tindak Lanjut Bagi Pelaksanaan Triwulan/RKPD Berikutnya

Bab V Penutup

- 5.1. Kesimpulan
- 5.2. Rekomendasi

BAB II

PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

2.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi merupakan cara atau pendekatan yang dipilih untuk mencapai sasaran pembangunan oleh daerah. Pilihan strategi tidak dapat dilepaskan dari nilai dan prinsip dasar pembangunan yang menjadi komitmen daerah, antara lain:

1. Pembangunan berkelanjutan sebagai konsekuensi dari komitmen daerah konservasi yang mengedepankan aspek kelestarian lingkungan, memperkuat kohesi sosial dan pengembangan ekonomi inklusif;
2. Pengembangan ekonomi berbasis potensi dan aset lokal, dengan mendorong pengelolaan sumberdaya alam untuk pengembangan penghidupan masyarakat, khususnya di perdesaan;
3. Kesenjangan gender dan inklusi sosial yang mendorong pengarusutamaan kebijakan pembangunan yang ramah terhadap perempuan, laki-laki dan kelompok marginal.
4. Penguatan demokrasi melalui peningkatan partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dalam tatakelola pemerintahan daerah.

Berdasarkan nilai dan prinsip tersebut, maka strategi pembangunan Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026, yaitu pengelolaan dan pengembangan sumberdaya daerah secara inklusif untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan antar wilayah. Pengelolaan Sumberdaya yang menjadi pilihan dalam strategi pembangunan daerah, adalah:

1. Sumberdaya Manusia (SDM). Kualitas SDM sangat mempengaruhi kualitas pembangunan suatu daerah, sehingga pilihan strategi pembangunan daerah harus mampu mengarah pada upaya pemanfaatan dan peningkatan SDM lokal guna peningkatan produktifitas dan melahirkan inovasi-inovasi baru. SDM meliputi SDM di tingkat birokrasi maupun masyarakat yang dapat saling berkolaborasi dalam pembangunan daerah. SDM yang unggul, beriman dan bertaqwa serta berintegritas tinggi, menjadi modal penting bagi Kabupaten Kuningan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah.
2. Sumberdaya Alam (SDA). Kabupaten Kuningan dikenal dengan potensi SDA yang luar biasa sehingga penting memanfaatkan kekayaan alam yang ada sebagai strategi untuk menjawab tantangan pembangunan yang saat ini masih dihadapi, khususnya kemiskinan dan ketimpangan antar wilayah. Pertanian dan keasrian alam dengan dukungan hutan dan air terjun menjadi potensi penting yang dapat dikelola sesuai dengan kewenangan yang ada di daerah maupun desa.

3. Modal Sosial dan Budaya. Karakteristik sosial dan budaya masyarakat masih sangat kuat di Kabupaten Kuningan. Solidaritas dan harmoni dalam balutan budaya masyarakat Sunda terbukti mampu menjadi modal sosial yang juga berkontribusi kuat dalam menggerakkan perekonomian. Salah satu contoh penting adalah urbanisasi yang digerakkan oleh modal sosial dan mampu menjadi salah satu strategi pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kuningan. Begitu juga dengan potensi budaya yang begitu beragam juga menjadi bagian penting yang belum optimal dimanfaatkan untuk pengembangan sektor wisata.
4. Jaringan/kemitraan. Pengalaman dalam membangun kemitraan Pentahelix yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pengembangan sektor pariwisata, antara pemerintah kabupaten, Swasta, Perguruan Tinggi, Komunitas, dan Media penting untuk terus dikembangkan karena membawa pengaruh positif dalam pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Kuningan. Kemitraan ini dapat menjadi strategi dalam pembangunan Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026.

Strategi pembangunan daerah harus mampu menggerakkan seluruh kekuatan atau potensi lokal yang ada guna mendukung pencapaian visi dan misi daerah. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026 akan melakukan dua pilihan strategi atau pendekatan pembangunan, yaitu:

1. Pembangunan berbasis sektoral. Pembangunan akan berfokus pada sektor-sektor strategis berdasarkan potensi yang dimiliki oleh daerah dan untuk menjawab kebutuhan atau tantangan pembangunan. Berdasarkan data yang tersaji pada bab sebelumnya, disebutkan bahwa pertanian dan pariwisata masih menjadi sektor penting yang banyak menggerakkan perekonomian daerah.
2. Pembangunan berbasis kewilayahan. Pembangunan akan berfokus pada pengembangan potensi yang ada di tiap desa atau kawasan dengan karakteristik yang beragam berdasarkan peta potensi yang ada. Pembangunan berbasis kewilayahan sangat penting dalam rangka mengatasi ketimpangan antar zona atau kawasan serta membangun karakteristik wilayah yang ada di Kabupaten Kuningan.

Pilihan strategi dan pendekatan yang tepat harus dilakukan untuk membangun Kabupaten Kuningan karena tantangan atau permasalahan yang dihadapi cukup rumit, terutama kemiskinan dan ketimpangan, serta ditambah dengan ruang fiskal yang terbatas. Oleh karena itu, pendekatan pembangunan berbasis potensi lokal dalam skala industri penting untuk menjadi fokus guna percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kuningan. Berikut adalah kerangka kerja pembangunan daerah yang akan dilakukan di Kabupaten Kuningan pada Tahun 2024-2026.

2.2 Tujuan dan Sasaran Kabupaten Kuningan

Tujuan dan sasaran dalam upaya pencapaian diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran

No.	Tujuan	Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran
T1	Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Daerah			Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten
				Indeks Gini
		S1	Menurunnya Tingkat kemiskinan	Persentase penduduk miskin;
				Jumlah Desa Rawan Pangan
				Skor Pola Pangan Harapan
		S2	Terlaksananya Pembangunan secara Berkeadilan dan Memberikan Kesempatan Berkembang berbasis desa dan kawasan perdesaan	Jumlah Desa berstatus Mandiri
				Jumlah Desa berstatus Maju
				Jumlah pusat pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan dan difasilitasi
T2	Membangun SDM Unggul dan Kompetitif			Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
				S3
		S4	Meningkatnya kualitas dan partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan dan olahraga	Indeks Pendidikan
				Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan
				Peningkatan Kapasitas SDM Kepeloporan
				Peningkatan Prestasi Olahraga
		S5	Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender (KKG)	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
		S6	Terkendalinya pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk
				MCPR (Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Peserta KB Modern: Suntik, Pil, Implant, IUD, MOP, MOW))
				TFR (Angka Kelahiran Total)
				i-bangga (Indeks Pembangunan keluarga)
				Unmet-need (Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi)
				ASFR (Angka Kelahiran Remaja)
				MUKP (Median Usia Kawin Pertama Perempuan)
T3	Mewujudkan Pengembangan dan Percepatan Daya Saing Daerah menuju Daerah Unggul			Indeks Daya Saing Daerah
				Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)
		S7	Meningkatnya investasi daerah	Jumlah Nilai Investasi
				Jumlah produk izin
		S8	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja dan Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
				Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan
				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
				Jumlah Pelatihan Tenaga Kerja bersertifikat
		S9	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur, Penataan Ruang, Lingkungan Hidup, dan Ketahanan Bencana	Persentase kondisi jaringan irigasi yang baik
				Akses Pelayanan Air minum
				Akses Sanitasi Layak

				Persentase Kemantapan jalan
				Persentase keselamatan konstruksi
				Persentase ketersediaan dokumen tata ruang
				Persentase Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
				Persentase orang yang menggunakan angkutan umum
				Persentase Rumah Terdampak Bencana yang tertangani
				Luasan kawasan kumuh yang tertangani (SK Bupati)
				Persentase rumah layak huni
				Panjang jalan lingkungan untuk menunjang fungsi hunian yang tertangani
				Jumlah bidang tanah yang tersertifikasi
				Penanganan Sampah
				Pengurangan Sampah
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
				Indeks Ketahanan Daerah (IKD)
T4	Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Unggul dan Kompetitif			Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
		S10	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah berbasis Agribisnis, Industri, Industri Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Sektor Lainnya	PDRB sektor Pertanian
				Jumlah Pengembangan Potensi Wisata Yang Berkelanjutan
				Kunjungan wisata
				Pembinaan Fasilitas HAKI Ekonomi Kreatif
				Jumlah Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang Bersertifika
T5	Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien			Indeks Reformasi Birokrasi
				Indeks Ketentraman Dan Ketertiban Umum
		S11	Meningkatnya Integritas, Kapasitas, Profesionalisme, dan Akuntabilitas SDM birokrasi serta Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Profesionalitas ASN
				Indeks Sistem Merit
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
				Indek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
				Meningkatnya produk yang dihasilkan
				Agregasi Kepemilikan Dokumen KTP Elektronik dan Akte Kelahiran 0 -18
				Nilai LPPD Kabupaten di tingkat Provinsi/Nasional
				Opini Laporan Keuangan Daerah
				Level SPIP
				Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
				Persentase Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan
		S12	Terwujudnya penegakan perundang-undangan daerah, ketentraman, ketertiban umum dan kondusivitas kehidupan berbangsa dan bermasyarakat berbasis kearifan lokal dan budaya daerah	Persentase Pelaksanaan Penegakan Perda dan Perkada
				Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu
				Indeks Gotong Royong (Aksi Bersama)
				Jumlah budaya dan seni lokal yang dilestarikan

Kebijakan umum pembangunan daerah menggambarkan tujuan sasaran pembangunan berdasarkan sasaran yang dipilih dengan target capaian indikator

kinerja sasaran. Dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan tahun 2024-2026, menetapkan rangkaian program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

2.3 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025

Dalam rangka mewujudkan keselarasan kebijakan pembangunan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten, maka rumusan prioritas pembangunan daerah disusun dengan memperhatikan sinergitas dengan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, dan prioritas pembangunan dalam RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025. Keterkaitan penetapan prioritas pembangunan daerah Tahun 2025, dengan prioritas pembangunan nasional tahun 2025 dan prioritas pembangunan provinsi Jawa Barat Tahun 202, disajikan pada tabel

Tabel 2.2. Sinergitas Prioritas Pembangunan Tahun 2025 Antara Pemerintah Pusat, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Kuningan

Prioritas Nasional RKP 2025		Prioritas Pembangunan RKPD Jawa Barat 2025		Prioritas Pembangunan Daerah RKPD 2025 Kab. Kuningan		Prioritas Nasional dan Provinsi yang Terkait
PN1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	PPP1	Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata	PPD1	Peningkatan SDM Unggul dan Kompetitif	Prioritas Nasional : PN3, PN4 ; Prioritas Provinsi : PPP2, PPP3
PN2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan menjamin pemerataan	PPP2	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama	PPD2	Peningkatan Tatakelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Prioritas Nasional : PN7; Prioritas Provinsi : PPP6
PN3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PPP3	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah	PPD3	Pengembangan dan Percepatan Daya Saing Daerah menuju Daerah Unggul	Prioritas Nasional : PN5, PN6 ; Prioritas Provinsi : PPP4, PPP5
PN4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PPP4	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	PPD4	Peningkatan Perekonomian Daerah yang Unggul dan Kompetitif	Prioritas Nasional : PN 1 ; Prioritas Provinsi : PPP1
PN 5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	PPP5	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa	PPD5	Peningkatan Pemerataan Pembangunan Daerah	Prioritas Nasional : PN 2 ; Prioritas Provinsi : PPP4
PN6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	PPP6	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah			
PN7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik					

2.4 Prioritas Pembangunan Daerah 1 (PPD1) dengan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Program Pembangunan Daerah, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggung Jawab

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran		Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2025	Strategi	Arah Kebijakan		Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2024	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder			
PPD 1 : Peningkatan SDM Unggul dan Kompetitif	1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	a	Indeks Kesehatan (Poin)	83,78-84,24	1	Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam bidang kesehatan	1	Membangun desa sehat berbasis Masyarakat	1	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam Promotif preventif untuk pengembangan dan pelaksanaan UKBM (Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat)	244	1,738,374,855	DINKES
								2	Meningkatkan mutu pelayanan sesuai standar pada fasilitas pelayanan Kesehatan	2	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah masyarakat yang terlayani di fasilitas kesehatan (Orang)	192787	147,118,107,767	DINKES
								3	Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit serta kesehatan lingkungan			Meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan perorangan dan masyarakat (Puskesmas)	37	208,521,176,663	
								4	Membangun kemitraan multipihak dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat			Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat RS yang terpenuhi (Persen)	100	142,550,000,000	
												Meningkatnya akses dan mutu layanan kesehatan perseorangan dan masyarakat (Unit Instalasi)	20	71,363,978,754	
								3	Program peningkatan kapasitas sumberdaya manusia kesehatan		Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	1	1,964,864,600	DINKES	
											Persentase Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terpenuhi	100	300,000,000		

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran		Indikator Kinerja (Satuan)		Target 2025	Strategi		Arah Kebijakan		Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2024	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
										4	Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Meningkatkan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (Sertifikat)	100	150,000,000	DINKES
	2	Meningkatnya kualitas dan partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan dan olahraga	a	Indeks Pendidikan (Poin)	61,68-61,96	1	Membangun sistem pendidikan masyarakat berbasis komunitas dan atau desa	1	Pemenuhan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas	1	Program pengelolaan pendidikan	APK SD/Paket A (Persen)	100,02	61,620,000,000	DISDIKBUD
			b	Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan (Persen)	0,5	2	Pembinaan organisasi kepemudaan dan kepeloporan	2	Membangun dan mengembangkan pusat-pusat belajar masyarakat			APM SD/Paket A (Persen)	99,91	61,620,000,000	
			c	Peningkatan Kapasitas SDM Kepeloporan (Orang)	200	3	Peningkatan prestasi atlet secara terencana dan berkesinambungan	3	Meningkatkan pembinaan organisasi kepemudaan dan kepeloporan			Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional (Persen)	1,9	80,210,000,000	
			d	Peningkatan Prestasi Olahraga (Medali)	6			4	Meningkatkan potensi pemuda dalam berwirausaha dan kepeloporan			Persentase SD berakreditasi minimal B (Persen)	97,60	124,800,000,000	
								5	Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga			Persentase SD yang memenuhi SPM (Persen)	100	124,800,000,000	
			6	Meningkatkan pembinaan dan pembibitan olahragawan	Guru profesional di SD (Persen)			59,30	552,500,000						
												Jumlah SD Memiliki rasio guru terhadap siswa sesuai SPM (Rasio)	1:06	552,500,000	
												APK SMP/Paket B (Persen)	99,52	83,135,000,000	

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran		Indikator Kinerja (Satuan)		Target 2025	Strategi		Arah Kebijakan		Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2024	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
											APM SMP/Paket B (Persen)	93,65	83,135,000,000		
											Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Persen)	1,9	19,552,426,400		
											Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Persen)	1,8	19,552,426,400		
											Persentase SMP berakreditasi minimal B (Persen)	85,10	150,000,000		
											Persentase SMP yang memenuhi SPM (Persen)	100	44,418,720,000		
											Guru profesional di SMP (Persen)	59,25	578,500,000		
											Jumlah SMP mempunyai rasio guru terhadap siswa sesuai SPM (Rasio)	1:06	1,690,000,000		
											APK PAUD usia 5-6 tahun (Persen)	93,98	92,852,500,000		
											Jumlah PAUD Holistik integratif (Unit)	150	750,000,000		
											Jumlah Lembaga PAUD (Unit)	920	32,500,000,000		
											Jumlah Jumlah program kursus dan pelatihan yang telah menerapkan KKNI	55	14,657,500,000		
											Jumlah Kecamatan minimal memiliki lembaga masyarakat rujukan (PKBM.Kursus.dan Pelatihan) (Lembaga)	58	2,550,000,000		
											Rasio Penilik PAUD (Rasio)	1:10	2,990,000,000		
										2	Program pembinaan perpustakaan	Meningkatnya budaya baca dan pengelolaan perpustakaan (Persen)	32,5	1,161,000,000	DISARPUS

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran		Indikator Kinerja (Satuan)		Target 2025	Strategi		Arah Kebijakan		Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2024	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
										3	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Meningkatnya pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan (Persen)	0,5	1,000,000,000	DISPORAPAR
										4	Program pengembangan kapasitas kepramukaan	Meningkatnya pengembangan Kapasitas Kepramukaan (orang)	200	600,000,000	DISPORAPAR
										5	Program pengembangan daya saing keolahragaan	Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan (Medali)	6	14,825,000,000	DISPORAPAR
	3	Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender (KKG)	a	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Poin)	87,02	1	Pengarusutamaan gender melalui pendekatan berbasis sektoral dan kewilayahan	1	Menerapkan perencanaan penganggaran responsif gender	1	Program pengelolaan sistem data gender dan anak	Jumlah dokumen profil Gender (Dokumen)	1	100,000,000	DPPKBP3A
								2	Meningkatkan partisipasi perempuan dalam bidang politik, sosial dan ekonomi	2	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Jumlah Perempuan dalam Jabatan Struktural/Eksekutif yang dibina (Orang)	50	600,000,000	DPPKBP3A
												Jumlah Perempuan dalam Politik yang dibina (Orang)	200		
												Jumlah OPD yang mendapatkan pembinaan perencanaan dan penganggaran responsif gender (OPD)	28		
												Jumlah anggota Kelompok Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) yang dibina (Orang (31 Kelp))	300		
												Jumlah Organsiasi Perempuan yang dibina (Organisasi)	39		

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran		Indikator Kinerja (Satuan)		Target 2025	Strategi		Arah Kebijakan		Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2024	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
										3	Program perlindungan perempuan	Jumlah Perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan oleh petugas terlatih dalam Unit Pelayanan Terpadu (Orang)	30	300,000,000	DPPKBP3A
										4	Program peningkatan kualitas keluarga	Jumlah Desa responsif perempuan dan anak (Desa)	3	500,000,000	DPPKBP3A
										5	Program pemenuhan hak anak (PHA)	Jumlah Kelembagaan Forum Anak yang dibina (Forum Anak)	22	250,000,000	DPPKBP3A
										6	Program perlindungan khusus anak	Jumlah anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh Petugas terlatih dalam Unit Pelayanan Terpadu (Orang)	34	450,000,000	DPPKBP3A
	4	Terkendalinya pertumbuhan penduduk	a	Laju Pertumbuhan Penduduk (Persen)	1,28	1	Pengendalian fertilitas	1	Meningkatkan pelayanan keluargaberencana dan kesehatan reproduksi	1	Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)	MUKP (Median Usia Kawin Pertama Perempuan) (Tahun)	20	1,473,200,000	DINSOS
			b	MCPR (Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Peserta KB Modern : Suntik, Pil, Implant, IUD, MOP, MOW)) (Persen)	67,24	2	Peningkatan kualitas keluarga dan penguatan kelembagaan	2	Meningkatkan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi serta ketahanan keluarga			Jumlah/Cakupan Kualifikasi Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Kelompok Akseptor (Kelompok)	125		DPPKBP3A
			c	TFR (Angka Kelahiran Total) (Anak)	2,30							Jumlah/Cakupan Kualifikasi Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Sub PPKBD (Institusi)	250		DPPKBP3A
			d	i-bangga (Indeks Pembangunan keluarga) (Poin)	52,73					2	Program pembinaan keluarga berencana (KB)	Jumlah Fasilitas Kesehatan dan Jejaringnya diseluruh Tingkatan Wilayah yang melayani KB (Fasilitas)	119	150,000,000	DPPKBP3A

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran		Indikator Kinerja (Satuan)		Target 2025	Strategi		Arah Kebijakan		Program Prioritas/ Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja (Satuan)	Target 2024	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah/ Stakeholder
			e	Unmet-need (Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi) (Persen)	20,76							Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi/ Contraceptive Prevelence Rate (CPR) (Persen)	67,24	150,000,000	
			f	ASFR (Angka Kelahiran Remaja) (Orang (Kelahiran))	17							Persentase Angka Pasangan Usia Subur (PUS) ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)	20,76	150,000,000	
			g	MUKP (Median Usia Kawin Pertama Perempuan) (Tahun)	20							Persentase Cakupan Pengguna Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	32,03	2,202,500,000	
			3	Program pengendalian penduduk	GDPK yang diimplementasikan sebagai dasar perencanaan (Dokumen)					1	1,150,000,000	DPPKBP3A			
					Jumlah sekolah formal/non formal yang melakukan pendidikan kependudukan (Sekolah)					5					
					Jumlah Rumah Data Paripurna (Rumah Data)					10					
					Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa (Desa)					376					
					Jumlah petugas lini lapangan yang mendapatkan pelatihan Sistem Informasi Keluarga (Petugas KB ASN)					75					
														1,451,435,275,439	

BAB III

CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025

3.1 Capaian Kinerja Sasaran

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah yang Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, maka penentuan Tujuan dan Sasaran harus disusun berdasarkan dokumen perencanaan yang berlaku yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2005-2025, beserta Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026 yang menjadi acuan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2025.

RPD Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Kuningan Nomor 20 Tahun 2023 memuat 5 (lima) tujuan dan 12 (dua belas) sasaran. Setiap tujuan dan sasaran dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang menggambarkan secara langsung tolok ukur keberhasilan pembangunan Kabupaten Kuningan dengan tingkatan kinerja paling tinggi yaitu dampak (*impact*). Penentuan target kinerja tujuan dan sasaran pada dokumen RPD dengan mempertimbangkan keselarasan pencapaian target kinerja tujuan Perencanaan Pembangunan di tingkat provinsi maupun nasional, yakni dengan mempertimbangkan permasalahan-permasalahan teknis yang terjadi.

RKPD Tahun 2025 merupakan tahapan pertama dari RPD Kabupaten Kuningan 2024-2026, dengan arah kebijakan pembangunan di Tahun 2025 yaitu **Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia** dengan tema “**Mewujudkan pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan antar wilayah**”. Arah kebijakan kewilayah di Kabupaten Kuningan berfokus pada pengembangan potensi yang ada di setiap desa atau kawasan dengan karakteristik yang beragam berdasarkan peta potensi yang ada. Pembangunan berbasis kewilayahan sangat penting dalam rangka mengatasi ketimpangan antar zona atau kawasan serta membangun karakteristik wilayah yang ada di Kabupaten Kuningan juga diselaraskan dengan kebijakan pembangunan regional Jawa Barat dan kebijakan nasional serta memperkuat program strategis berskala kewilayahan yang dituangkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan. Percepatan pembangunan di Kawasan Rebana meliputi: Kabupaten Subang, Kabupaten

Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon dan Kabupaten Kuningan.

Apabila dianalisis dari data capaian pembangunan di Kabupaten Kuningan, masih banyak pekerjaan rumah yang dihadapi pada tahun 2025 yang perlu dipecahkan bersama, antara lain:

a) Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Kuningan masih berada di atas rata-rata Jawa Barat. Angka kemiskinan untuk tahun 2024 sebesar 11,88%. Hal ini perlu upaya penanggulangan yang sungguh-sungguh dari semua *stakeholder* yang ada.

Kemiskinan bukan hanya persoalan pemerintah daerah, kemiskinan bisa dientaskan jika semua pihak peduli. Segenap instansi terkait bersama segenap stakeholder harus dapat saling bergerak bersama menekan jumlah kemiskinan di Kuningan. Rumahtangga dikatakan miskin apabila:

- 1) luas lantai bangunan tempat tinggalnya kurang dari 8 m² per orang;
- 2) lantai bangunan tempat tinggalnya terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan;
- 3) dinding bangunan tempat tinggalnya terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah atau tembok tanpa diplester;
- 4) tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama rumah tangga lain menggunakan satu jamban;
- 5) sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik;
- 6) air minum berasal dari sumur/mata air yang tidak terlindung/sungai/air hujan;
- 7) bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah;
- 8) hanya mengonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu;
- 9) hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun;
- 10) hanya mampu makan satu/dua kali dalam sehari;
- 11) tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik;
- 12) sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp 600.000 per bulan;
- 13) pendidikan terakhir kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat sekolah dasar (SD)/hanya SD; dan
- 14) tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp 500.000 seperti sepeda motor (kredit/nonkredit), emas, hewan ternak, kapal motor ataupun barang modal lainnya.

Secara teknokratis, dalam penanggulangan kemiskinan ini dipandang perlu dilakukan penguatan pendapatan individu yang secara otomatis akan meningkatkan pendapatan rumah tangga. Hal ini dapat dilakukan melalui optimalisasi usaha kecil dan mikro (UKM) yang relatif sesuai dengan tipikal penduduk lapisan bawah.

b) Pembangunan Manusia

Apabila memperhatikan disparitas capaian IPM beserta komponen-komponennya antar kabupaten/kota di Jawa Barat, posisi Kabupaten Kuningan secara umum masih mengungguli kabupaten di Wilayah III Cirebon (Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan – Ciayumajakuning), IPM Kabupaten Kuningan tahun 2024 sebesar 71,56.

Dari sekian komponen indikator pendukung IPM yang perlu mendapat perhatian khusus adalah rata-rata lama sekolah yang masih berkisar pada 7,90 tahun.

c) Angkatan Kerja

Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk yang aktif secara ekonomi, yaitu penduduk yang sedang bekerja dan penduduk yang sedang mencari pekerjaan. Pada tahun 2024, jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 570.023 orang. Ada kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 50.365 orang. Jumlah Angkatan kerja di Kabupaten Kuningan, mencapai 618.129 orang. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka jumlah angkatan kerja mengalami kenaikan sebesar 43.960 orang.

Tabel Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Menurut Status Ketenagakerjaan di Kabupaten Kuningan Tahun 2020 - 2023

Tahun	Bekerja	Pengangguran	Angkatan Kerja	Bukan Angkatan Kerja	Jumlah	TPAK
2021	479.405	63.377	542.782	307.770	830.552	68,62
2022	478.750	52.075	530.825	328.136	858.961	61,80
2023	519.658	54.511	574.169	352.617	926.786	61,95
2024	570.023	48.511	618.129	320.717	926.786	65,84

Sumber: BPS, Kuningan Dalam Angka, 2025

d) Pendidikan

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada satu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Angka ini berguna untuk mengetahui tingkat partisipasi pendidikan menurut kelompok umur tertentu. Semakin tinggi angka partisipasi sekolah

di suatu wilayah tentunya akan semakin tinggi kualitas manusia secara makro ditinjau dari dimensi pengetahuan.

Angka Partisipasi Kasar (APK) diterjemahkan sebagai proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. Angka ini menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan.

Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan proporsi anak sekolah pada suatu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya terhadap seluruh anak pada kelompok usia tersebut. Angka ini dapat digunakan untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat pada waktunya.

**Angka Harapan Lama Sekolah dan Angka Rata-rata Lama Sekolah,
Tahun 2021 - 2024 Kabupaten Kuningan**

URAIAN	TAHUN			
	2021	2022	2023	2024
Harapan Lama Sekolah	12,23	12,24	12,26	12,27
Rata-Rata Lama Sekolah	7,80	7,88	7,89	7,90

Sumber: BPS, Kuningan Dalam Angka, 2025

e) Kesehatan

Upaya meningkatkan dimensi umur panjang dan sehat dalam rangka meningkatkan pembangunan manusia, dapat dimulai dari faktor kualitas khususnya kualitas kesehatan manusia yang dilahirkan (keturunan), keadaan lingkungan, serta pelayanan kesehatan. Faktor kualitas kesehatan manusia yang dilahirkan dapat dilihat dari indikator rata-rata umur kawin pertama. Pernikahan usia muda akan meningkatkan risiko perempuan mengalami gangguan reproduksi, gangguan kehamilan, serta gangguan persalinan yang pada akhirnya akan berpengaruh pada kualitas kesehatan manusia yang dilahirkan. Faktor lingkungan dapat digambarkan melalui ketersediaan sarana sanitasi yang memadai, yang dapat dilihat melalui indikator kepemilikan jamban serta penggunaan fasilitas tempat buang air besar yang memenuhi syarat-syarat kesehatan serta indikator sumber air minum yang digunakan. Apabila lingkungan tempat tinggal dalam kondisi sehat maka diharapkan dapat menjadi salah satu modal untuk meningkatkan dimensi umur panjang dan sehat.

Pelayanan kesehatan dalam hal ini ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan dapat dilihat dari seberapa besar desa yang memiliki sarana kesehatan dan tenaga kesehatan. Sarana kesehatan yang digunakan masyarakat sebagai tempat untuk mengobati keluhan kesehatan serta tersedianya tenaga kesehatan yang

memadai akan menunjang derajat kesehatan masyarakat menjadi lebih baik yang pada akhirnya akan meningkatkan dimensi umur panjang dan sehat.

Angka Harapan Hidup Kabupaten Kuningan Tahun 2021-2024

INDIKATOR	2021	2022	2023	2024
Usia Harapan Hidup	73,78	74,03	74,91	75,22

Sumber: BPS, Kuningan Dalam Angka, 2025

Upaya Pemerintah Kabupaten Kuningan melalui intervensi dengan sederetan program untuk meningkatkan derajat kesehatan penduduknya tampak telah membuahkan hasil yang cukup menggembirakan walaupun kenaikannya tidak begitu besar. Ini terlihat dari kecenderungan meningkatnya besaran Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH) selama kurun waktu 2021-2024, dari tahun 2021 sebesar 73,78 ke tahun 2022 sebesar 74,03 meningkat 0,25 tahun dalam kurun waktu 2023 sebesar 74,91 sampai dengan 2024 sebesar 75,22, mengalami peningkatan sebesar 0,31.

f) Perekonomian

Berbagai kebijakan makro ekonomi yang diarahkan pada upaya untuk mendorong secara simultan, peningkatan kinerja kategori riil maupun moneter harus tetap dikembangkan. Indikator yang kerap digunakan untuk mengevaluasi hasil-hasil pembangunan bidang ekonomi suatu wilayah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik yang dihitung dari sisi produksi dan penggunaan serta disajikan atas dasar harga berlaku (*current price*) dan harga konstan (*constan price*).

Dengan diketahuinya nilai PDRB diharapkan dapat dijadikan dasar oleh pengambil keputusan untuk :

- 1. Penyediaan data ekonomi makro bagi perencanaan dan evaluasi pembangunan.
- 2. Menggambarkan derajat kesenjangan masyarakat.
- 3. Memperlihatkan pergeseran aktivitas perekonomian masyarakat.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan dasar pengukuran atas nilai tambah yang mampu diciptakan akibat adanya berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah. Data PDRB tersebut menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki. Oleh karena itu besarnya PDRB yang mampu dihasilkan sangat tergantung pada faktor tersebut. Adanya keterbatasan dua faktor di atas menyebabkan PDRB bervariasi antar daerah.

Secara makro besaran PDRB yang dihitung atas dasar harga berlaku di Kabupaten Kuningan pada tahun 2024 yaitu sebesar 5,61%, atau dari semula sebesar Rp 32.544,89 miliar menjadi Rp 35.535,77 miliar. Perkembangan PDRB yang dihitung atas dasar harga berlaku belum dapat dijadikan sebagai indikator yang menggambarkan peningkatan volume produk barang atau jasa di wilayah Kuningan (kinerja perekonomian), karena pada besaran PDRB tersebut masih terkandung inflasi yang sangat mempengaruhi harga barang/jasa secara umum. Untuk menganalisis perkembangan dari volume produk barang/jasa atau pertumbuhan ekonomi secara makro umumnya digunakan PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan.

Dari hasil perhitungan, BPS mencatat PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan tahun 2010 di Kabupaten Kuningan pada tahun 2023 mencapai Rp 19.418,73 miliar dan menjadi Rp 20.507,27 miliar pada tahun 2024. Kondisi tersebut merupakan indikasi *quantum* (volume) produk barang/jasa secara umum perekonomian Kabupaten Kuningan secara makro mengalami percepatan dibanding dengan tahun sebelumnya sebesar 5,61%. Besaran peningkatan PDRB yang dihitung berdasarkan harga konstan tersebut yang kerap dipakai sebagai indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE).

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kuningan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), 2021–2024

	Lapangan Usaha	2021	2022	2023*	2024**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.435,08	7.026,81	7.723,37	8.253,92
B	Pertambangan dan Penggalian	369,59	375,77	407,76	419,64
C	Industri Pengolahan	610,72	663,71	719,05	805,34
D	Pengadaan Listrik & Gas	25,49	27,32	28,79	27,63
E	Pengadaan Air, Pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	28,56	30,01	31,11	36,69
F	Konstruksi	2.342,69	2.533,80	2.750,90	2.868,04
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.785,58	4.106,71	4.424,73	4.773,35
H	Transportasi dan Pergudangan	3 673,81	4.353,13	5.194,09	6.276,13
I	Penyediaan akomodasi dan Makan Minum	484,72	568,47	641,89	692,77
J	Informasi dan Komunikasi	1.154,70	1.211,23	1.306,64	1.483,02
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1557,61	1.667,16	1.789,77	1.913,27
L	Real Estate	732,08	798,74	865,88	913,01
M.N	Jasa Perusahaan	123,82	145,33	161,89	156,32
O	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	932,41	919,34	958,83	1.045,15

P	Jasa Pendidikan	3.374,44	3.638,16	3.924,13	4.127,25
Q	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	440,21	473,30	514,21	521,23
R,S,T,U	Jasa lainnya	847,6	980,84	1.101,86	1.223,00
	PDRB	26.919,10	29.519,83	32.544,89	35.535,77

Sumber: BPS, Kuningan Dalam Angka, 2025

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Tabel
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kuningan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), 2021–2024

Lapangan Usaha		2021	2022	2023*	2024**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.675,49	3.812,90	3.894,39	3.644,68
B	Pertambangan dan Penggalian	245,14	243,51	245,97	262,35
C	Industri Pengolahan	430,15	453,98	475,00	502,71
D	Pengadaan Listrik dan Gas	16,77	17,36	17,90	19,20
E	Pengadaan Air, Pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	17,36	17,85	18,36	20,81
F	Konstruksi	1.534,20	1.579,41	1.659,77	1.709,76
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2751,05	2.862,89	2.982,16	2.991,73
H	Transportasi dan Pergudangan	2.293,42	2.580,10	2.837,97	3.403,93
I	Penyediaan akomodasi dan Makan Minum	310,70	349,94	374,25	395,07
J	Informasi dan Komunikasi	1.223,60	1.304,80	1.402,17	1.655,75
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	903,64	894,50	936,16	974,68
L	Real Estate	618,42	653,07	695,21	770,49
M,N	Jasa Perusahaan	82,81	92,48	98,86	91,96
O	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	531,67	525,34	538,67	566,57
P	Jasa Pendidikan	1.896,95	2.020,36	2.130,30	2.280,56
Q	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	314,78	333,66	350,25	372,65
R,S,T,U	Jasa lainnya	636,86	708,17	761,35	844,38
	PDRB	17.483,02	18.450,34	19.418,73	20.507,27

Sumber: BPS, Kuningan Dalam Angka, 2025

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Apabila disimak tabel di atas, seperti tahun-tahun sebelumnya, kategori andalan atau kategori yang memberi sumbangan terbesar adalah pertanian, dimana pada tahun 2024 kategori ini memberikan sumbangan nilai tambah yang dihitung atas dasar harga berlaku sebesar Rp 8.253,92 miliar, Kondisi tersebut dapat dimengerti, karena kegiatan ekonomi sebagian besar penduduk di wilayah Kabupaten Kuningan

masih tampak didominasi oleh kategori pertanian. Hal ini terlihat dari sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di kategori ini serta sebagian besar lahan di wilayah Kabupaten Kuningan digunakan untuk kegiatan di kategori pertanian (hampir mencapai 3/4 dari total luas wilayah Kabupaten Kuningan).

PDRB Per kapita sering menjadi acuan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi PDRB Per kapita suatu daerah, maka semakin baik tingkat perekonomian daerah tersebut, walaupun ukuran ini belum mencakup faktor kesenjangan pendapatan antar penduduk. PDRB Per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran dan pendapatan. Nilai PDRB Kabupaten Kuningan atas dasar harga berlaku sejak tahun 2021 hingga 2024 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2021 PDRB per kapita tercatat sebesar 26.919 ribu rupiah. Pada tahun 2022 mengalami kenaikan mencapai 29.519 ribu rupiah, pada tahun 2023 mengalami kenaikan mencapai 32.544 ribu rupiah dan ditahun 2024 mencapai 35.535 ribu rupiah. Peningkatan ini dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume. Peningkatan PDRB sisi produksi diikuti oleh peningkatan PDRB menurut komponen pengeluaran bisa dilihat pada tabel dibawah.

PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Kuningan Tahun 2021-2024 (ribu rupiah)

Uraian	2021	2022	2023*	2024**
PDRB Perkapita ADHB	26.919,10	29.519,83	32.544,89	35.535,77

Sumber: BPS Kabupaten Kuningan, 2025
*): Angka Pebaikan, **): Angka Sementara

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah pengelolaan aset daerah. Pengelolaan aset menjadi sangat penting dalam menunjang penerimaan daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset

daerah pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah.

Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (Non APBD) antara lain pendanaan melalui APBN, PHLN, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan serta bina lingkungan yang semuanya merupakan potensi sumber penerimaan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

3.3. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan

Tabel 3.2.1 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (dalam Lampiran 1)

3.4. Capai Indikator Kinerja Daerah Tahun 2022 dan Tujuan, Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2024 - 2026

Capaian Indikator Makro Kabupaten Kuningan tahun 2022 menggunakan data dari data yang di keluarkan oleh Badan Pusat Statistik untuk tahun 2023 capaiannya baru beberapa yang sudah ada data namun data tersebut baru sangat sementara, bisa dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 3.2.2 Tujuan, dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2024-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target/Capaian					Kondisi Akhir RPD
					Target 2024	Capaian 2024	Target RKPD 2025	Capaian 2025	Target 2026	
T1	Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Daerah		Indeks Gini	Poin	0,336	0,379	0,340 - 0,347		0,328	0,328
		Meningkatnya Pemerataan Pembangunan di wilayah Perdesaan	Indeks Desa Membangun	Poin	0,764	0,7936	0,783		0,793	0,793
		Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat	Persentase Penduduk Miskin (%)	Persen	11,12-12,72	11,88	10,42 - 11,50		10,68-12,98	10,68-12,98
			Pengeluaran per kapita	Ribu	9.933	10.418	10.071		10.210	10.210
		Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman	Persentase rumah tangga hunian layak	Persen	97,54	96,42	97,54		97,94	97,94
T2	Membangun SDM Unggul dan Kompetitif		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	71,28	71,56	71,79		72,31	72,31
		Meningkatnya Akses Pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,68	7,90	12,37		12,89	12,89
			Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8	7,9	7.91		8,18	8,18
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	74,6	75,22	75.27		75,08	75,08
			Prevalensi Stunting	Persen	16	7,9	7,9		14	14
		Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pembangunan Pemuda	Indeks Pembangunan Gender	Poin	87,49	88,00	88		88,01	88,01

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target/Capaian					Kondisi Akhir RPD
					Target 2024	Capaian 2024	Target RKPD 2025	Capaian 2025	Target 2026	
		Terkendalinya Pertumbuhan dan Distribusi Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,28	1,04	1,04		1,24	1,24
T3	Mewujudkan Pengembangan dan Percepatan Daya Saing Daerah menuju Daerah Unggul		Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Poin	3,46	3,82	3,82		3,56	3,56
			Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	Poin	130	141,55	129		128	128
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	65,98	72,05	68,16		66,58	66,58
		Meningkatnya Pembangunan Rendah Karbon dan Menurunnya Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	Poin	129	141,55	129		128	128
		Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah dan Pelayanan Infrastruktur	Tingkat Konektivitas	Persen	86	82,352	82,352		87,79	87,79
			Tingkat kemantapan jalan							
T4	Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Unggul dan Kompetitif		Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	5,16-5,66	5,61	5,61		5,66-5,76	5,66-5,76
		Meningkatnya Nilai Investasi dan Kualitas Usaha yang Disertai dengan Meningkatnya Daya Saing dan Penempatan Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	8,51-9,21	7,78	7,78		8,13-8,89	8,13-8,89
		Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum PDRB /Pariwisata	Persen	1,75-1,92	1,95	1,95		1,75-1,96	1,75-1,96

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target/Capaian					Kondisi Akhir RPD
					Target 2024	Capaian 2024	Target RKPD 2025	Capaian 2025	Target 2026	
		Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perindustrian dan Perdagangan	Laju pertumbuhan Sektor Industri	Persen	2,31	5,83	5,83		2,34	2,34
			Laju Pertumbuhan sektor perdagangan	persen	4,83	0,32	0,32		4,85	4,85
		Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan	Nilai Tukar Petani (NTP)	Poin	104,91	113,86	113,86		105,52	105,52
			Kontribusi Sektor Pertanian	Persen	7,93	23,56	23,56		8,36	8,36
			Skor Pola Pangan Harapan	Poin	87,01	93,8	93,8		89,03	89,03
T5	Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien		Indeks Reformasi Birokrasi	Skor	CC	BB	B		B	B
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	85,7	84,5	86,4		87,1	87,1
		Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Skor	CC	BB	B		B	B
		Meningkatnya Penerapan Inovasi Daerah dalam Pembangunan	Indeks Inovasi Daerah	Poin	45,03	29,82	53,76		62,49	62,49

3.5. Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Pencapaian Prioritas Pembangunan Provinsi dan Nasional

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kuningan tahun 2025 pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPD) tahun rencana sesuai tabel di bawah:

Tabel 3.2.3 Dukungan Program Prioritas Daerah Terhadap Kegiatan Prioritas pada Prioritas Nasional Tahun 2025

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROV. JABAR	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROV. JABAR	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KAB. KUNINGAN	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KAB. KUNINGAN	INDIKATOR KINERJA
PN.01 Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia							
1	Memperkokoh ideologi pancasila, penguatan demokrasi, dan penegakan hak asasi manusia	1. Penguatan kebebasan masyarakat sipil untuk berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat	PPP6 : Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	PPD5 : Peningkatan Tatakelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Meningkatnya pemahaman terhadap ideologi negara serta menguatnya karakter kebangsaan masyarakat (Persen)
		2. Penguatan kesetaraan masyarakat atas informasi publik		Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik		Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Tersampaikannya Informasi Pembangunan Daerah (Persen)
PN.02 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru							

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROV. JABAR	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROV. JABAR	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KAB. KUNINGAN	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KAB. KUNINGAN	INDIKATOR KINERJA
1	Keamanan siber, sandi, dan sinyal	Penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama pada ranah siber dan area rentan	PPP6 : Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	PPD5 : Peningkatan Tatakelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Terlaksananya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi (OPD)
		Fasilitasi business matchmaking startup digital	PPP6 : Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	PPD5 : Peningkatan Tatakelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Program Aplikasi Informatika	Terlaksananya pengelolaan Website Pemerintah Kabupaten Kuningan (Persen)
			PPP1 : Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan dan Budidaya untuk Membuka Lapangan Kerja Seluas-luasnya	Program Pengembangan UMKM	PPD1 : Peningkatan Pemerataan Pembangunan Daerah	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	Peningkatan jumlah UKM Binaan (Unit Usaha)
		Fasilitasi digital <i>technopreneur</i>	PPP6 : Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	PPD5 : Peningkatan Tatakelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Program Aplikasi Informatika	Terlaksananya pengelolaan Website Pemerintah Kabupaten Kuningan (Persen)

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROV. JABAR	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROV. JABAR	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KAB. KUNINGAN	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KAB. KUNINGAN	INDIKATOR KINERJA
			PPP1 : Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan dan Budidaya untuk Membuka Lapangan Kerja Seluas-luasnya	Program Pengembangan UMKM	PPD1 : Peningkatan Pemerataan Pembangunan Daerah	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	Peningkatan jumlah UKM Binaan (Unit Usaha)
		Pemanfaatan teknologi digital di sektor pertanian	PPP6 : Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	PPD5 : Peningkatan Tatakelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Program Aplikasi Informatika	Terlaksananya pengelolaan Website Pemerintah Kabupaten Kuningan (Persen)
			PPP1 : Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan dan Budidaya untuk Membuka Lapangan Kerja Seluas-luasnya	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	PPD4 : Peningkatan Perekonomian Daerah yang Unggul dan Kompetitif	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Tersedianya prasarana pertanian (Unit)
2	Peningkatan kualitas lingkungan	Pembangunan tempat pembuangan sampah terpadu, tempat pengolahan sampah reduce-reuse-recycle, atau fasilitas pengolahan sampah lainnya	PPP5 : Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa	Program Pengelolaan Persampahan	PPD 2 : Pengembangan dan Percepatan Daya Saing Daerah menuju Daerah Unggul	Program Pengelolaan Sampah	Penanganan Sampah (Persen) dan Pengurangan Sampah (Persen)
3	Swasembada pangan, energi, dan air	Peningkatan produktivitas	PPP1 : Pertumbuhan Ekonomi Berbasis	Program Penyediaan dan	PPD4 : Peningkatan		Tersedianya sarana pertanian (Unit)

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROV. JABAR	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROV. JABAR	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KAB. KUNINGAN	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KAB. KUNINGAN	INDIKATOR KINERJA
		hortikultura dan peternakan yang berkelanjutan	Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan dan Budidaya untuk Membuka Lapangan Kerja Seluas-luasnya	Pengembangan Sarana Pertanian	Perekonomian Daerah yang Unggul dan Kompetitif	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya populasi ternak besar dan ternak kecil (Ekor
				Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	PPD4 : Peningkatan Perekonomian Daerah yang Unggul dan Kompetitif	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Tersedianya prasarana pertanian (Unit)
		Prasarana irigasi air tanah atau irigasi lainnya yang dibangun dari Waduk Kuningan (Daerah Irigasi Cileuweung)	PPP5 : Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	PPD 2 : Pengembangan dan Percepatan Daya Saing Daerah menuju Daerah Unggul	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Meningkatnya kualitas pengelolaan SDA (Persen)
		Prasarana air baku yang dibangun pada sistem penyediaan air minum Waduk Kuningan	PPP5 : Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	PPD 2 : Pengembangan dan Percepatan Daya Saing Daerah menuju Daerah Unggul	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Meningkatnya cakupan air bersih kepada masyarakat (Persen)
		Sertifikat benih hortikultura di Kabupaten Kuningan	PPP1 : Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan dan Budidaya untuk	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	PPD4 : Peningkatan Perekonomian Daerah yang Unggul dan Kompetitif	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Tersedianya sarana pertanian (Unit)

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROV. JABAR	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROV. JABAR	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KAB. KUNINGAN	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KAB. KUNINGAN	INDIKATOR KINERJA
			Membuka Lapangan Kerja Seluas-luasnya				
PN. 03 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi							
1	Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur	Pengembangan Kertajati Aerocity	PPP5 : Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	PPD 2 : Pengembangan dan Percepatan Daya Saing Daerah menuju Daerah Unggul	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase ketersediaan dokumen tata ruang (Persen)
		Penguatan produktivitas industri makanan dan minuman	PPP1 : Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan dan Budidaya untuk Membuka Lapangan Kerja Seluas-luasnya	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	PPD1 : Peningkatan Pemerataan Pembangunan Daerah	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Peningkatan Jumlah produk unggulan Daerah yang dipromosikan (Produk)
		Penguatan produktivitas industri tekstil dan produk tekstil, serta alas kaki	PPP1 : Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan dan Budidaya untuk Membuka Lapangan Kerja Seluas-luasnya	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	PPD1 : Peningkatan Pemerataan Pembangunan Daerah	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Peningkatan Jumlah produk unggulan Daerah yang dipromosikan (Produk)

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROV. JABAR	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROV. JABAR	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KAB. KUNINGAN	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KAB. KUNINGAN	INDIKATOR KINERJA
		Penguatan ekosistem film, animasi, visual arts, seni, budaya, kerajinan, kuliner, dan pemampu ekonomi kreatif	PPP1 : Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan dan Budidaya untuk Membuka Lapangan Kerja Seluas-luasnya	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	PPD4 : Peningkatan Perekonomian Daerah yang Unggul dan Kompetitif	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya kapasitas sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif (Orang)
						Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	Meningkatnya kapasitas pelaku ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual (Orang)
		Penguatan ekosistem pengembangan aplikasi dan game	PPP6 : Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	PPD5 : Peningkatan Tatakelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Program Aplikasi Informatika	Terlaksananya pengelolaan Website Pemerintah Kabupaten Kuningan (Persen)
		Penuntasan dan peningkatan kualitas infrastruktur teknologi, informasi, dan komunikasi	PPP6 : Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	PPD5 : Peningkatan Tatakelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Program Aplikasi Informatika	Terlaksananya pengelolaan Website Pemerintah Kabupaten Kuningan (Persen)

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROV. JABAR	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROV. JABAR	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KAB. KUNINGAN	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KAB. KUNINGAN	INDIKATOR KINERJA
		Pembangunan jalan strategis di Jalan Lingkar Timur Selatan (Kab. Kuningan)	PPP5 : Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa	Program Penyelenggaraan Jalan	PPD 2 : Pengembangan dan Percepatan Daya Saing Daerah menuju Daerah Unggul	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Kemantapan jalan (Persen)
		Bendungan yang direhabilitasi/ditingkatkan kapasitasnya berupa pembangunan transmisi air baku	PPP1 : Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan dan Budidaya untuk Membuka Lapangan Kerja Seluas-luasnya	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	PPD 2 : Pengembangan dan Percepatan Daya Saing Daerah menuju Daerah Unggul	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Meningkatnya kualitas pengelolaan SDA (Persen)
PN 04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas							
1	Memperkuat Pendidikan, Sains, dan Teknologi	Pelaksanaan wajib belajar 13 tahun yang berfokus pada percepatan peningkatan layanan akses pendidikan anak usia dini (taman kanak-kanak/raudhatul athfal/bustanul athfal) dan sekolah menengah atas/sekolah menengah	PPP2 : Reformasi Sistem Pendidikan, Pemajuan Kebudayaan, Pendidikan Agama dan Kehidupan Beragama	Program Pengelolaan Pendidikan	PPD 3 : Peningkatan SDM Unggul dan Kompetitif	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/Paket A (Persen)
							Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Paket A (Persen)
							Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/Paket B (Persen)
							Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Paket B (Persen)

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROV. JABAR	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROV. JABAR	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KAB. KUNINGAN	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KAB. KUNINGAN	INDIKATOR KINERJA
		kejuruan/madrasah aliyah/sederajat					
		Pengembangan bidang keahlian jenjang sekolah menengah kejuruan difokuskan untuk mendorong potensi daerah setempat pada sektor industri pengolahan	PPP2 : Reformasi Sistem Pendidikan, Pemajuan Kebudayaan, Pendidikan Agama dan Kehidupan Beragama	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	PPD 3 : Peningkatan SDM Unggul dan Kompetitif	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Meningkatnya pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan (Persen)
		Percepatan penurunan ketimpangan gender, khususnya melalui pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan; pencegahan perkawinan anak, dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang, utamanya pada wilayah kantong pekerja migran	PPP2 : Reformasi Sistem Pendidikan, Pemajuan Kebudayaan, Pendidikan Agama dan Kehidupan Beragama	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	PPD 3 : Peningkatan SDM Unggul dan Kompetitif	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Jumlah Perempuan dalam Jabatan Struktural/ Eksekutif yang dibina (Orang)
	Jumlah Perempuan dalam Politik yang dibina (Orang)						
	Jumlah anggota Kelompok Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) yang dibina (Orang (31 Kelp))						
	Jumlah Organsiasi Perempuan yang dibina (Organisasi)						
				Program Perlindungan Perempuan	PPD 3 : Peningkatan SDM Unggul dan Kompetitif	Program Perlindungan Perempuan	Jumlah Perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan oleh petugas terlatih dalam Unit Pelayanan Terpadu (Orang)

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROV. JABAR	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROV. JABAR	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KAB. KUNINGAN	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KAB. KUNINGAN	INDIKATOR KINERJA
				Program Peningkatan Kualitas Keluarga	PPD 3 : Peningkatan SDM Unggul dan Kompetitif	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Jumlah Desa responsif perempuan dan anak (Desa)
				Program pemenuhan hak anak (PHA)	PPD 3 : Peningkatan SDM Unggul dan Kompetitif	Program pemenuhan hak anak (PHA)	Jumlah Kelembagaan Forum Anak yang dibina (Forum Anak)
				Program perlindungan khusus anak	PPD 3 : Peningkatan SDM Unggul dan Kompetitif	Program perlindungan khusus anak	Jumlah anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh Petugas terlatih dalam Unit Pelayanan Terpadu (Orang)
		Peningkatan kapasitas layanan unggulan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, serta kesehatan ibu dan anak di RS di kabupaten/kota	PPP3 : Penguatan Sistem Kesehatan Daerah	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	PPD 3 : Peningkatan SDM Unggul dan Kompetitif	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat RS yang terpenuhi (Persen)
						Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam Promotif preventif untuk pengembangan dan pelaksanaan UKBM (Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat)

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROV. JABAR	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROV. JABAR	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KAB. KUNINGAN	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KAB. KUNINGAN	INDIKATOR KINERJA
		Fasilitasi literasi digital	PPP6 : Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	PPD5 : Peningkatan Tatakelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Program Aplikasi Informatika	Terlaksananya pengelolaan Website Pemerintah Kabupaten Kuningan (Persen)
2	Memperkuat Sistem Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Penurunan kematian ibu dan bayi	PPP3 : Penguatan Sistem Kesehatan Daerah	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	PPD 3 : Peningkatan SDM Unggul dan Kompetitif	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat RS yang terpenuhi (Persen)
						Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam Promotif preventif untuk pengembangan dan pelaksanaan UKBM (Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat)
		Pembangunan kualitas keluarga	PPP2 : Reformasi Sistem Pendidikan, Pemajuan Kebudayaan, Pendidikan Agama dan Kehidupan Beragama	Program Pengendalian Penduduk	PPD 3 : Peningkatan SDM Unggul dan Kompetitif	Program Pengendalian Penduduk	GDPK yang diimplementasikan sebagai dasar perencanaan (Dokumen)
							Jumlah sekolah formal/ non formal yang melakukan pendidikan kependudukan (Sekolah)
							Jumlah Rumah Data Paripurna (Rumah Data)

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROV. JABAR	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROV. JABAR	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KAB. KUNINGAN	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KAB. KUNINGAN	INDIKATOR KINERJA
							Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa (Desa)
							Jumlah petugas lini lapangan yang mendapatkan pelatihan Sistem Informasi Keluarga (Petugas KB ASN)
				Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	PPD 3 : Peningkatan SDM Unggul dan Kompetitif	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi/ Contraceptive Prevelence Rate (CPR) (Persen)
							Jumlah Fasilitas Kesehatan dan Jejaringnya diseluruh Tingkatan Wilayah yang melayani KB (Fasilitas)
							Persentase Angka Pasangan Usia Subur (PUS) ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)
							Persentase Cakupan Pengguna Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
				Program Pemberdayaan dan Peningkatan	PPD 3 : Peningkatan SDM	Program Pemberdayaan dan Peningkatan	MUKP (Median Usia Kawin Pertama Perempuan) (Tahun)

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROV. JABAR	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROV. JABAR	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KAB. KUNINGAN	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KAB. KUNINGAN	INDIKATOR KINERJA
				Keluarga Sejahtera (KS)	Unggul dan Kompetitif	Keluarga Sejahtera (KS)	Jumlah/Cakupan Kualifikasi Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Kelompok Akseptor (Kelompok)
							Jumlah/Cakupan Kualifikasi Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Sub PPKBD (Institusi)
PN 05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri							
1	Pengembangan hilirisasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru	Penguatan industri kimia dasar dan logam dasar	PPP1 : Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan dan Budidaya untuk Membuka Lapangan Kerja Seluas-luasnya	Program perencanaan dan pembangunan industri	PPD 2 : Pengembangan dan Percepatan Daya Saing Daerah menuju Daerah Unggul	Program perencanaan dan pembangunan industri	Peningkatan Pertumbuhan Industri (Persen)
		Hilirisasi industri kelapa	PPP1 : Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan dan Budidaya untuk Membuka Lapangan Kerja Seluas-luasnya	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	PPD1 : Peningkatan Pemerataan Pembangunan Daerah	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Peningkatan Jumlah produk unggulan Daerah yang dipromosikan (Produk)

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROV. JABAR	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROV. JABAR	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KAB. KUNINGAN	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KAB. KUNINGAN	INDIKATOR KINERJA
2	Penguatan industri padat karya berkelanjutan, industri dasar, dan industri strategis nasional	Pengembangan industri kimia hilir dan farmasi	PPP1 : Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan dan Budidaya untuk Membuka Lapangan Kerja Seluas-luasnya	Program perencanaan dan pembangunan industri	PPD 2 : Pengembangan dan Percepatan Daya Saing Daerah menuju Daerah Unggul	Program perencanaan dan pembangunan industri	Peningkatan Pertumbuhan Industri (Persen)
		Pengembangan industri alat angkut termasuk electric vehicle dan kedirgantaraan	PPP1 : Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan dan Budidaya untuk Membuka Lapangan Kerja Seluas-luasnya	Program perencanaan dan pembangunan industri	PPD 2 : Pengembangan dan Percepatan Daya Saing Daerah menuju Daerah Unggul	Program perencanaan dan pembangunan industri	Peningkatan Pertumbuhan Industri (Persen)
		Pengembangan industri elektronik dan digital	PPP1 : Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan dan Budidaya untuk Membuka Lapangan Kerja Seluas-luasnya	Program perencanaan dan pembangunan industri	PPD 2 : Pengembangan dan Percepatan Daya Saing Daerah menuju Daerah Unggul	Program perencanaan dan pembangunan industri	Peningkatan Pertumbuhan Industri (Persen)
						Program pengelolaan sistem informasi industri nasional	Peningkatan jumlah pendataan SIINAS
						PN 06. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROV. JABAR	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROV. JABAR	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KAB. KUNINGAN	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KAB. KUNINGAN	INDIKATOR KINERJA
1	Pemerataan ekonomi	Pengembangan sistem perumahan publik yang terpadu dengan layanan infrastruktur dasar perkotaan dan disertai dengan penguatan tata kelola	PPP5 : Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa	Program Pengembangan Perumahan	PPD 2 : Pengembangan dan Percepatan Daya Saing Daerah menuju Daerah Unggul	Program Pengembangan Perumahan	Terlaksananya Perbaikan rumah bagi korban bencana dan Pembangunan PSU yang terdampak bencana (Unit)
		Peremajaan kota (<i>urban renewal</i>) secara inklusif dan terpadu dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh	PPP5 : Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa	Program Kawasan Permukiman	PPD 2 : Pengembangan dan Percepatan Daya Saing Daerah menuju Daerah Unggul	Program Kawasan Permukiman	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman kumuh (Ha)
PN 07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan							
1	Membangun <i>Single Identity Number</i> dan Sistem Informasi Administrasi dan Data Base	Pengembangan pelayanan terpadu satu pintu daerah berbasis <i>online single submission</i> dan mal	PPP6 : Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	PPD5 : Peningkatan Tatakelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Program Aplikasi Informatika	Terlaksananya pengelolaan Website Pemerintah Kabupaten Kuningan (Persen)

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROV. JABAR	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROV. JABAR	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KAB. KUNINGAN	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KAB. KUNINGAN	INDIKATOR KINERJA
	Kependudukan untuk mencegah identitas ganda, mencegah penyalahgunaannya, dan memudahkan pelacakan aset, pajak, maupun persoalan Nomor Induk Kependudukan Ganda pada Daftar Pemilih Tetap di dalam Pemilu	pelayanan publik digital			PPD 2 : Pengembangan dan Percepatan Daya Saing Daerah menuju Daerah Unggul	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Media informasi perizinan dan nonperizinan (Media)
PN 08. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur							
1	Masyarakat adil, makmur, dan harmonis	Penyediaan sumber daya manusia berkompeten, sarana, dan prasarana pencarian dan pertolongan	PPP4 : Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Program Penanggulangan Bencana	PPD 2 : Pengembangan dan Percepatan Daya Saing Daerah menuju Daerah Unggul	Program Penanggulangan Bencana	Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Dokumen)
						Program Penanganan Bencana	Penyelenggaraan Penanganan Bencana (Dokumen)

Pembangunan Kabupaten Kuningan Tahun 2025 diarahkan untuk menjabarkan dan melaksanakan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Kuningan periode 2024-2026. Pencapaian target sasaran pembangunan diindikasikan dengan sejumlah indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Guna mencapai target indikator kinerja sasaran pembangunan, maka dilakukan pengendalian dan evaluasi secara periodik dan berkesinambungan.

Hasil pengendalian dan evaluasi memberikan gambaran riil mengenai kondisi capaian pembangunan di wilayah Jawa Barat. Kondisi ini menjadi dasar pertimbangan dalam perumusan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang akan dijadikan salah satu input bagi pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan, selain berbagai pertimbangan lainnya seperti kebijakan pembangunan nasional Tahun 2025, amanat penerapan standar pelayanan minimal, pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan, dan dokumen perencanaan strategis lainnya, serta kondisi sosial dan ekonomi.

Pembangunan Kabupaten Kuningan Tahun 2025 diarahkan untuk mencapai sasaran-sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) periode 2024-2026. Guna mencapai sasaran tersebut, maka serangkaian program pembangunan akan dilaksanakan pada Tahun 2025. Dari seluruh program perangkat daerah Tahun 2025 dipilih program-program yang diprioritaskan untuk mencapai sasaran pembangunan sekaligus dalam rangka mewujudkan program Jabar Juara. Program-program yang telah dipilih selanjutnya disebut dengan program pembangunan daerah.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan, yang meliputi Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon dan Kabupaten Kuningan. Konsep pengembangan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan ini menggunakan konsep Integrasi, Inovatif, Kolaboratif, Berdaya Saing dan Berkelanjutan, kemudian di kembangkan ke dalam konsep struktur ruang kawasan pengembangan polysentric smart region merupakan struktur ruang yang didalamnya terdapat kawasan perkotaan inti (Growth Pole) dan kawasan perkotaan sekitarnya (Growth Foundation). Growth Pole di Kawasan Rebana adalah Kertajati Aerocity, Kota Baru Patimban, dan Kota Cirebon yang saling meningkatkan kualitas dan daya saing dari masing-masing wilayah. Untuk Growth Foundation di Kawasan Rebana terdiri dari pengembangan 13 kawasan peruntukan industri (KPI) dan 20 sentra industri Kecil Menengah (SIKM) yang ada

di Kawasan Rebana. Dalam pengembangan industri di kawasan Rebana perlu adanya insentif dari pemerintah untuk perusahaan di kawasan rebana yang banyak menyerap tenaga kerja, sehingga proyek pembangunan yang ternaungi dalam perpres Rebana dapat bermanfaat bagi pengembangan wilayah di kawasan Rebana, terutama Kabupaten Kuningan.

BAB IV

FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

4.1. Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Kinerja

Pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kuningan tidak terlepas dari beberapa faktor pendorong dan penghambat pencapaian kinerja. Faktor pendorong pencapaian target-target kinerja tersebut, antara lain yaitu:

- a) Peningkatan kualitas sumber daya aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.
- b) Penerapan teknologi lebih lanjut pada beberapa sektor program/kegiatan pendukung pencapaian kinerja, (Aplikasi pada perencanaan SIPD, Aplikasi satadaku dan lain-lain).
- c) Meningkatnya partisipasi masyarakat/stakeholder dalam keterlibatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- d) Keadaan geografis Kabupaten Kuningan yang mendukung potensi pertanian dan pariwisata yang akan mendongkrak sektor perekonomian masyarakat dan menjadi nilai tambah bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Beberapa faktor penghambat pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kuningan antara lain:

- a) Lemahnya/ kurang pemahaman para stakeholder terhadap sistem perencanaan pembangunan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
- b) Lemahnya tingkat koordinasi antar instansi terkait.
- c) Adanya perubahan dan atau tumpang tindih regulasi dari pemerintah pusat/ provinsi.
- d) Rendahnya kapasitas fiskal APBD Kabupaten Kuningan.

4.2. Tindak Lanjut Bagi Pelaksanaan Triwulan/RKPD Berikutnya

- a) Dokumen Perencanaan (Renja, Renstra, RKPD, RPJMD/RPD) diharapkan menjadi acuan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan.
- b) Perangkat Daerah melakukan evaluasi secara triwulanan terhadap capaian indikator kinerja yang ada pada dokumen perencanaan.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil evaluasi RKPD Kabupaten Kuningan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Semua Program yang tercantum dalam RPD, merupakan tahap pertama sehingga proses pelaksanaan Pembangunan Daerah diharapkan sesuai dengan Perencanaan;
2. Masih terdapat indikator kinerja Perangkat Daerah pada tahun 2024 yang merupakan tahun ke dua periode RPD 2024-2026 dan dilanjutkan pada tahun 2025.

5.2. Rekomendasi

Rekomendasi yang dapat diberikan dari hasil evaluasi RKPD Kabupaten Kuningan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka meningkatkan keselarasan program dan kegiatan antara APBD dengan RKPD maka penyusunan KUA-PPAS, dan RAPBD perlu memperhatikan Renja Perangkat Daerah dan RKPD.
2. Perlu dilaksanakan monitoring secara intensif dalam proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKPD agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selaras dengan dokumen perencanaan terkait.
3. Perlu dilakukan pengendalian secara intensif dalam penyusunan KUA-PPAS dan APBD sehingga selaras dengan RKPD.

L A M P I R A N

EVALUASI terhadap HASIL RKPD
KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2025

No	Sasaran	Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target RPD pada Tahun 2024 s/d 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2024	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 yang direvisasi	Realisasi Kinerja pada Tahunan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kab./Kota yang Diakuisisi (2025)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2025 (Aksi) Tahun pelaksanaan (RPJMD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025	SAPO Penanggung jawab	Ket.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
					K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	Rp. (R000)	K	R

		1.01.02.2.01.28	Pembinaan Ketenagahan dan Manajemen Sekolah				100.000.000	1.075.000.000	210.000.000					210.000.000		89.53	310.000.000		
		1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				99.079.844.400	92.864.470.000								-	99.079.844.400		
		1.01.02.2.01.31	Peningkatan Kapasitas Pengajaran Dana BOS Sekolah Dasar				75.000.000	100.000.000								-			
		1.01.02.2.01.37	Pembangunan Ruang Kelas Baru				200.000.000	141.591.562								-			
		1.01.02.2.01.48	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				-	2.803.866.754								-			
		1.01.02.2.01.50	Pengembangan Proses Belajar bagi Peserta Didik				75.000.000	100.000.000								-			
		1.01.02.2.01.61	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				62.527.802.843	1.300.000.000								-			
		1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				70.685.858.822	57.673.660.891	653.634.853							653.634.853			71.339.493.675
		1.01.02.2.02.02	Pembangunan Ruang Kelas Baru				19.943.819	200.000.000								-			19.943.819
		1.01.02.2.02.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TL				-	250.000.000								-			
		1.01.02.2.02.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah				-	407.085.025								-			
		1.01.02.2.02.05	Pembangunan Perustakaan Sekolah				-	400.000.000								-			
		1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				-	1.051.4.806.003								-			1.054.326.003
		1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				21.661.749.000	4.636.506.847	403.634.853							403.634.853			22.265.383.853
		1.01.02.2.02.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah				-	200.000.000								-			
		1.01.02.2.02.16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah				-	200.000.000								-			
		1.01.02.2.02.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perustakaan Sekolah				-	200.000.000								-			
		1.01.02.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium				-	200.000.000								-			
		1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				-	250.000.000								-			
		1.01.02.2.02.25	Pengadaan Material Sekolah				100.000.000	149.759.036								-			
		1.01.02.2.02.27	Pengadaan Peralengkapan Sekolah				-	100.000.000								-			
		1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Pratik dan Penguji Siswa				2.100.000.000	175.000.000								-			2.100.000.000
		1.01.02.2.02.36	Penyenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik				50.000.000									-			
		1.01.02.2.02.38	Pembinaan Moral, Sikak dan Kepribadian Siswa				100.000.000	175.000.000	175.000.000							100.000	175.000.000		
		1.01.02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan				250.000.000	325.000.000	325.000.000							100.000	325.000.000		
		1.01.02.2.02.40	Pengembangan Kari Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				50.000.000	75.000.000	75.000.000							-			
		1.01.02.2.02.41	Pembinaan Ketenagahan dan Manajemen Sekolah				50.000.000									-			50.000.000
		1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				44.999.360.000	46.446.400.000								-			44.999.360.000
			Peningkatan Kapasitas Pengajaran Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				-	100.000.000								-			
		1.01.02.2.02.44	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TL				-									-			
		1.01.02.2.02.45	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah				-									-			
		1.01.02.2.02.58	Penyenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				250.000.000									-			
		1.01.02.2.02.59	Pembangunan Ruang Kelas Baru				-	591.586.937								-			
		1.01.02.2.02.64	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TL				-	100.000.000								-			
		1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				30.895.286.000	26.125.094.757								-			30.895.286.000
		1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD				92.578.000									-			
		1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD				100.000.000	704.580.757								-			100.000.000
		1.01.02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD				-									-			
		1.01.02.2.03.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD				3.950.198.000	200.000.000								-			
		1.01.02.2.03.07	Pengadaan Material PAUD				150.000.000	200.000.000								-			150.000.000
		1.01.02.2.03.09	Pengadaan Peralengkapan PAUD				-	1.500.236.000								-			
		1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Pratik dan Penguji Siswa PAUD				200.000.000	100.000.000								-			200.000.000
		1.01.02.2.03.13	Penyenggaraan Proses Belajar PAUD				200.000.000	100.000.000								-			200.000.000
		1.01.02.2.03.16	Pengembangan Kari Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD				3.150.000.000	200.000.000								-			3.150.000.000
		1.01.02.2.03.17	Pembinaan Ketenagahan dan Manajemen PAUD				700.000.000	1.400.000.000								-			700.000.000
		1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOS PAUD				22.294.110.000	21.520.280.000								-			
		1.01.02.2.03.19	Pengelolaan Kapasitas Pengajaran Dana BOS PAUD				56.200.000									-			
		1.01.02.2.03.30	Pembangunan Ruang Kelas Baru				200.000.000	200.000.000								-			19.644.777.000
		1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Keasraan				19.644.777.000	20.275.000.000								-			
		1.01.02.2.04.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Keasraan				1.266.617.000									-			1.266.617.000
		1.01.02.2.04.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Keasraan				-									-			
		1.01.02.2.04.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Keasraan				-									-			
		1.01.02.2.04.09	Pengadaan Peralengkapan Pendidikan Nonformal/Keasraan				-									-			
		1.01.02.2.04.11	Pengadaan Alat Pratik dan Penguji Siswa Nonformal/Keasraan				-									-			
		1.01.02.2.04.12	Penyenggaraan Proses Belajar Nonformal/Keasraan				200.000.000									-			200.000.000
		1.01.02.2.04.15	Pengembangan Kari Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Keasraan				300.000.000									-			300.000.000
		1.01.02.2.04.16	Pembinaan Ketenagahan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Keasraan				2.640.000.000	1.450.000.000								-			2.640.000.000
		1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Nonformal/Keasraan				15.238.160.000	18.625.000.000								-			15.238.160.000
		1.01.02.2.04.18	Peningkatan Kapasitas Pengajaran Dana BOS Sekolah Nonformal/Keasraan				-									-			
		1.01.02.2.04.42	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendidikan				-	75.000.000								-			
		1.01.02.2.04.46	Peningkatan Proses Belajar bagi Peserta Didik				-	125.000.000								-			
		1.01.04	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan				4.823.910.000	325.000.000								80V/01	325.000.000		6,74
			Pembinaan program pengajaran profesional di SD dan SMP				778.050.000									-			
			Pembinaan program pengajaran profesional di SD dan SMP				778.050.000									-			
			Pembinaan program pengajaran profesional di SD dan SMP				3.267.810.000									-			
			Pembinaan program pengajaran profesional di SD dan SMP				-									-			
		1.01.04.01	Pembinaan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Keasraan				325.000.000									-			325.000.000
		1.01.04.01.01	Peningkatan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Keasraan				225.000.000									-			225.000.000
		1.01.04.01.02	Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Keasraan				100.000.000									-			100.000.000
		222	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				46.996.000.000	3.153.452.000	2.240.773.950							-			3.153.452.000
		222.02	Program Pengembangan Kebudayaan				36.348.000.000	478.452.000	808.250.000							-			478.452.000
			Peningkatan program di bidang seni dan budaya				8.608.000.000									-			
			Program seni dan budaya				8.608.000.000									-			
			Peningkatan program di bidang seni dan budaya				8.608.000.000									-			
			Program seni dan budaya				10.374.000.000									-			
		222.02.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelaksana dalam Daerah Kabupaten/Kota				100.000.000	100.000.000								-			100.000.000
		222.02.01.01	Peningkatan Pengembangan, Pemertanian Objek Pemeliharaan Kebudayaan				50.000.000	50.000.000</											

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	1.05.04	PROGRAM PENGEHAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELARATAN KEBAKARAN DAN PENVELAMATAN NON KEBAKARAN			1.853.000.000	310.000.000	25.200.000	-	-	-	-	-	25.200.000	8,13	1.878.200.000		
		Cakupan pelayanan bencana berdasarkan RABP Kota		1.489.536.293	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahaya Berbahaya dan Bencana Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			1.853.000.000	310.000.000	25.200.000	-	-	-	-	-	25.200.000	8,13	1.878.200.000		
	1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			1.410.000.000	150.000.000	8.400.000	-	-	-	-	-	8.400.000	5,69	1.418.400.000		
	1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			210.000.000	50.000.000	8.400.000	-	-	-	-	-	8.400.000	16,80	218.400.000		
	1.05.04.2.01.03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran			233.000.000	110.000.000	8.400.000	-	-	-	-	-	8.400.000	7,64	241.400.000		
	1.06.00.0.00.00.00.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)															
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			2.861.416.100	1.149.731.000	27.650.000	-	-	-	-	-	27.650.000	2,40	2.889.066.100		
	1.06.01	PROGRAM PENJUALAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.106.878.546	3.140.435.489	856.560.945	-	-	-	-	-	856.560.945	27,38	3.962.618.591		
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			36.755.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.755.000		
	1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			36.755.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.755.000		
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.222.241.076	2.291.694.079	674.651.388	-	-	-	-	-	674.651.388	20,41	2.406.842.464		
	1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.222.241.076	-	2.201.694.079	-	-	-	-	-	-	-	2.222.241.076		
	1.06.01.2.04	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1.06.01.2.04.02	Pengisian Pokokan Dinas Besar atau Admistrasi Kepegawaian			268.066.000	143.695.500	28.761.000	-	-	-	-	-	28.761.000	20,02	296.827.000		
	1.06.01.2.04.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1.06.01.2.04.06.01	Penyediaan Kompensasi Insentif Lulusan/Penerapan Berdasarkan Kantor			9.000.000	10.000.000	1.871.000	-	-	-	-	-	1.871.000	18,71	10.871.000		
	1.06.01.2.04.06.02	Pembinaan/Pelatihan dan Peningkatan Keterampilan			77.842.500	29.472.500	11.285.000	-	-	-	-	-	11.285.000	38,20	89.127.500		
	1.06.01.2.04.06.03	Pembinaan/Pelatihan Rumah Tangga			8.153.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.153.500		
	1.06.01.2.04.06.04	Pembinaan/Bantuan Logistik Kantor			37.700.000	22.000.000	3.700.000	-	-	-	-	-	3.700.000	11,60	41.400.000		
	1.06.01.2.04.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengolahan			26.460.000	19.996.000	3.720.000	-	-	-	-	-	3.720.000	14,60	32.180.000		
	1.06.01.2.04.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			32.560.000	20.000.000	6.425.000	-	-	-	-	-	6.425.000	32,13	38.985.000	#DIV/0!	
	1.06.01.2.04.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			74.350.000	36.577.000	1.700.000	-	-	-	-	-	1.700.000	4,65	76.050.000		
	1.06.01.2.04.06.10	Penelusuran Arsip Dinamis pada SKPD			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1.06.01.2.07.09	Pengadaan Prasarana dan Mesin Lainnya															

		1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.495.843.353	4.044.273.630	1.163.430.755				1.163.430.755	28,77	5.659.274.359				
		1.06.01.2.02.01	Persediaan dari dan Transferan A/R			4.470.843.353	4.039.273.630	1.163.430.755				1.163.430.755	28,82	5.634.274.359				
		1.06.01.2.02.04	Kontribusi dan Pelaksanaan Anggaran SKPD			25.000.000	15.000.000	-				-	-	25.000.000				
		1.06.01.2.05	Administrasi Kewenangan Perangkat Daerah			190.000.000	-	-				-	-	190.000.000				
		1.06.01.2.05.02	Pengadaan Peralatan Dinas Berkelas A/R			-	-	-				-	-	-				
		1.06.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen			15.000.000	-	-				-	-	15.000.000				
		1.06.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			-	-	-				-	-	-				
		1.06.01.2.06.11	Biningsan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			175.000.000	-	-				-	-	175.000.000				
		1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			626.327.000	170.000.000	12.980.000				12.980.000	7,64	633.137.000				
		1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			26.554.000	15.000.000	1.460.000				1.460.000	9,73	28.034.000				
		1.06.01.2.06.02	Pengadaan Peralatan dan Pedagogikan Kantor			249.500.000	30.000.000	2.790.000				2.790.000	8,36	252.290.000				
		1.06.01.2.06.04	Pengadaan Bahan Logistik Kantor			123.000.000	44.000.000	-				-	-	167.000.000				
		1.06.01.2.06.05	Pengadaan Bahan Gedung dan Peralapangan			68.000.000	31.000.000	4.030.000				4.030.000	13,87	72.030.000				
		1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			30.000.000	10.000.000	4.710.000				4.710.000	47,10	34.710.000				
		1.06.01.2.06.09	Pertanggungjawaban Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			120.103.000	-	-				-	-	120.103.000				
		1.06.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			5.000.000	40.000.000	-				-	-	5.000.000				
		1.06.01.2.06.10	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungutan Utusan Pemerintah Daerah			14.600.000	-	-				-	-	14.600.000				
		1.06.01.2.07.06	Pengadaan Jalan			14.600.000	-	-				-	-	14.600.000				
		1.06.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-	-	-				-	-	-				
		1.06.01.2.08	Pengadaan Jasa Pemungutan Utusan Pemerintahan Daerah			603.422.000	625.850.000	142.174.225				142.174.225	22,72	745.596.225				
		1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			104.996.800	86.375.000	15.812.625				15.812.625	18,31	120.809.425				
		1.06.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Perawatan dan Pengangkutan Kantor			47.572.000	20.000.000	-				-	-	47.572.000				
		1.06.01.2.08.04	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungutan Utusan Pemerintahan Daerah			430.953.200	519.475.000	126.361.600				126.361.600	29,32	557.214.800				
		1.06.01.2.09	Pengadaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jekel			325.975.000	25.000.000	5.440.000				5.440.000	25,76	331.415.000				
		1.06.01.2.09.01	Pemeliharaan/Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			77.690.000	25.000.000	5.440.000				5.440.000	21,76	83.130.000				
		1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			144.285.000	-	-				-	-	144.285.000				
		1.06.02	PROGRAM FEMBERDAYAN SOSIAL			1.006.960.000	300.000.000	50.000.000				50.000.000	16,67	1.006.960.000				
		1.06.02.1.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota			50.000.000	-	-				-	-	50.000.000				
		1.06.02.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Peraturan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Promosi/aksi Undian atau Baku			50.000.000	-	-				-	-	50.000.000				
		1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			956.960.000	300.000.000	50.000.000				50.000.000	16,67	1.006.960.000				
		1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kabupaten/Kota			217.765.000	300.000.000	50.000.000				50.000.000	16,67	267.765.000				
		1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota			184.685.000	-	-				-	-	184.685.000				
		1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kecamatan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			554.510.000	-	-				-	-	554.510.000				
		1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Komunitas Kesejahteraan Keluarga (KKK)			-	-	-				-	-	-				
		1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			595.000.000	60.000.000	27.410.000				27.410.000	45,68	622.410.000				
		1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Tertentu, Anak Tertentu, Layuh Usia Tertentu, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			295.000.000	60.000.000	27.410.000				27.410.000	45,68	322.410.000				
		1.06.04.2.01.01	Penyediaan Pembiayaan			60.000.000	50.000.000	20.000.000				20.000.000	40,00	80.000.000				
		1.06.04.2.01.02	Penyediaan Logistik			-	10.000.000	7.380.000				7.380.000	73,80	7.380.000				
		1.06.04.2.01.03	Pengadaan Alat Bantu			135.000.000	-	-				-	-	135.000.000				
		1.06.04.2.01.04	Pembelian Pelayanan Rehabilitasi Keluarga			-	-	-				-	-	-				
		1.06.04.2.01.06	Pembelian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Tertentu, Anak Tertentu, Layuh Usia Tertentu, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat			-	-	-				-	-	-				
		1.06.04.2.01.07	Facilitasi Pembelian Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak			-	-	-				-	-	-				
		1.06.04.2.01.09	Pembelian Layanan Data dan Prosedur			-	-	-				-	-	-				
		1.06.04.2.01.10	Pembelian Layanan Ketenagakerjaan			55.000.000	-	-				-	-	55.000.000				
		1.06.04.2.01.11	Pembelian Pelayanan Penyaluran Keluarga			-	-	-				-	-	-				
		1.06.04.2.01.12	Pembelian Layanan Psikologi			45.000.000	-	-				-	-	45.000.000				
		1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial			300.000.000	-	-				-	-	300.000.000				
		1.06.04.2.02.05	Penyediaan Pembiayaan Kesehatan di Luar Panti			60.000.000	-	-				-	-	60.000.000				
		1.06.04.2.02.07	Pembelian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial			150.000.000	-	-				-	-	150.000.000				
		1.06.04.2.02.10	Pembelian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			-	-	-				-	-	-				
		1.06.04.2.02.14	Korupsi/ancur Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota			90.000.000	-	-				-	-	90.000.000				
		1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			2.218.883.600	-	-				-	-	2.218.883.600				
		1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Tertentu			-	-	-				-	-	-				
		1.06.05.2.01.01	Pengelolaan Data Anak Tertentu			-	-	-				-	-	-				
		1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir-Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			2.218.883.600	-	-				-	-	2.218.883.600				
		1.06.05.2.02.01	Pembelian Fakir-Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			82.440.000	-	-				-	-	82.440.000				
		1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir-Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			112.100.000	-	-				-	-	112.100.000				
		1.06.05.2.02.03	Facilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga			2.024.343.600	-	-				-	-	2.024.343.600				
		1.06.05.2.02.04	Facilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat			-	-	-				-	-	-				
		1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA			490.000.000	-	-				-	-	490.000.000				
		1.06.06.2.01	Peringatan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			212.000.000	-	-				-	-	212.000.000				
		1.06.06.2.01.01	Pengelolaan Bencana			147.000.000	-	-				-	-	147.000.000				
		1.06.06.2.01.02	Penyediaan Bantuan			65.000.000	-	-				-	-	65.000.000				
		1.06.06.2.02	Pemeliharaan Pembiayaan Masyarakat Kabupaten/Kota			278.000.000	-	-				-	-	278.000.000				
		1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Terapi Stages Bencana			278.000.000	-	-				-	-	278.000.000				
		1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLE AWAN			50.000.000	-	-				-	-	50.000.000				
		1.06.07.2.01.01	Pemeliharaan Pemeliharaan dan Pemeliharaan Makam			324.000.000	-	-				-	-	324.000.000				

2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.756.724.000	28.657.135.108	8.816.106.224	-	-	-	-	8.816.106.224	96,76	12.572.892.224		
2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	115.000.000	148.975.000	28.560.000	-	-	-	-	20.560.000	13,80	135.560.000		
2.09.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000		9.750.000	-	-	-	-	9.750.000	65,00	24.750.000		
2.09.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD	75.000.000	10.000.000	9.750.000	-	-	-	-					
2.09.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.000.000	18.975.000	1.810.000	-	-	-	-	3.810.000	9,78	78.810.000		
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	172.400.000	24.390.806.408	8.333.495.970	-	-	-	-	8.333.495.970	51,98	8.506.895.970		
2.09.01.2.02.01	Penyediaan Diklat dan Pelatihan ASN		26.300.856.408	8.333.495.970	-	-	-	-	8.333.495.970	51,98	8.333.495.970		
2.09.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	157.400.000			-	-	-	-			157.400.000		
2.09.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Badan/Unit/Bagian/Struktur SKPD	15.000.000			-	-	-	-			15.000.000		
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.066.446.000	270.053.508	56.967.500	-	-	-	-	56.967.500	51,09	1.133.407.508		
2.09.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Gedung	96.860.000	15.000.000	9.059.000	-	-	-	-	9.059.000	60,39	105.919.000		
2.09.01.2.06.02	Penyediaan Perlengkapan dan Peralengkapan Kantor	564.480.000	109.690.500	27.935.500	-	-	-	-	27.935.500	18,45	592.375.500		
2.09.01.2.06.03	Penyediaan Perlengkapan Rumah Tangga	25.000.000			-	-	-	-			25.000.000		
2.09.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.000.000	25.000.000	4.400.000	-	-	-	-	4.400.000	17,60	104.400.000		
2.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengabdian	100.000.000	13.528.000	10.778.000	-	-	-	-	10.778.000	86,03	110.778.000		
2.09.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Baku dan Peralatan Peningkat-Identitas	38.100.000	15.000.000	4.815.000	-	-	-	-	4.815.000	52,49	34.815.000		
2.09.01.2.06.09	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	140.000.000	32.815.000		-	-	-	-			140.000.000		
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.429.884.000	1.433.057.200	384.332.754	-	-	-	-	384.332.754	26,82	1.814.216.754		
2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi: Sumber Daya Air dan Listrik	266.552.000	269.725.200	52.372.154	-	-	-	-	52.372.154	19,42	318.924.154		
2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.163.332.000	1.183.132.000	331.960.600	-	-	-	-	331.960.600	28,54	1.495.292.600		
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perungjung Urusan Pemerintahan Daerah	983.000.000	414.343.000	26.796.000	-	-	-	-	26.796.000	5,81	1.009.796.000		
2.09.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan: Biaya Pemeliharaan dan Biaya Kebutuhan Pemangan Onsite atau Kondeksian Onsite Abaikan	200.000.000	50.000.000	3.500.000	-	-	-	-	3.500.000	7,00	203.500.000		
2.09.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Peralatan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	783.000.000	364.343.000	17.250.000	-	-	-	-	17.250.000	4,74	800.250.000		
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	25.000.000	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	25.000.000		
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	25.000.000		
2.09.02.2.01.03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	25.000.000	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	25.000.000		
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.153.840.000	4.027.195.448	378.690.075	-	-	-	-	378.690.075	9,40	2.532.530.075		
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyuluhan Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	1.283.528.000	1.003.030.000	233.840.075	-	-	-	-	233.840.075	23,31	1.517.368.075		
2.09.03.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	750.000.000	160.363.000		-	-	-	-			750.000.000		
2.09.03.2.01.06	Pengembangan Ketersediaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko-Toko Kelenteng	383.520.000	542.667.000	221.875.000	-	-	-	-	221.875.000	40,89	605.395.000		
2.09.03.2.01.10	Pengembangan Ketersediaan Distribusi Pangan Kabupaten/Kota	150.000.000	300.000.000	11.965.075	-	-	-	-	11.965.075	3,99	344.965.075		
2.09.03.2.01.14	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok, Strategis				-	-	-	-					
2.09.03.2.02	Pengalokasian dan Ketersediaan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	200.000.000	378.796.448	-	-	-	-	-	-	-	200.000.000		
2.09.03.2.02.02	Penyediaan Sarana Produksi Pangan Lokal												
2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Perantara Kabupaten/Kota	200.000.000	378.796.448	-	-	-	-	-	-	-	200.000.000		
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Penyerta Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	670.320.000	2.645.367.000	144.850.000	-	-	-	-	144.850.000	5,48	815.170.000		
2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Pemetaan Target Konsumsi Pangan per Keluarga Tahun	50.000.000			-	-	-	-			50.000.000		
2.09.03.2.04.02	Pembordiran Masyarakat dalam Pengenakanngaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	620.320.000	2.645.367.000	144.850.000	-	-	-	-	144.850.000	5,48	765.170.000		
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	1.036.604.250	1.808.721.000	-	-	-	-	-	-	-	1.036.604.250		
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.036.604.250	1.808.721.000	-	-	-	-	-	-	-	1.036.604.250		
2.09.04.2.02.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Peta Ketahanan Gizi		1.808.721.000	-	-	-	-	-	-	-	1.036.604.250		
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	100.000.000	60.250.000	-	-	-	-	-	-	-	100.000.000		
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	60.250.000	-	-	-	-	-	-	-	100.000.000		
2.09.05.2.01.07	Penyediaan Sarana Pengawasan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	60.250.000	-	-	-	-	-	-	-	100.000.000		
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	27.449.751.859	14.331.372.256	497.069.150	-	-	-	-	497.069.150	3,47	27.946.820.209		
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	9.904.003.500	4.221.868.500	497.069.150	-	-	-	-	497.069.150	11,77	10.401.072.650		

	3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian			4.183.903.500	4.217.885.150	497.069.150				497.069.150		11,78	6.680.972.650			
	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			16.277.397.558	5.367.495.850	-	-	-	-	-	-	-	16.277.397.558			
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Penelitian dan pengembangan pertanian	34.307.760.000													
	3.27.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani			16.277.397.558	5.367.495.850	-	-	-	-	-	-	-	16.277.397.558			
	3.27.03.2.02.02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Petak			100.000.000	96.617.000								100.000.000			
	3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani			9.432.397.558	4.364.078.850								9.432.397.558			
	3.27.03.2.02.04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Part			-	-								-			
	3.27.03.2.02.06	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perku Air			-	-								-			
	3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Petak Lahan			1.150.000.000	239.300.000								1.150.000.000			
	3.27.03.2.02.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani			5.595.000.000	667.500.000								5.595.000.000			
	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	TERSEDIAKAN ya kegiatan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat	4.800.000.000													
	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Terdapatnya program penyuluhan pertanian	16.550.000.000	1.268.358.000	4.740.008.000	25.000.000	-	-	-	-	-	25.000.000	6,53	1.293.358.000		
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			1.268.358.000	4.740.008.000	25.000.000	-	-	-	-	-	25.000.000	6,53	1.293.358.000		
	3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Keterampilan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa			269.765.000	201.075.000							25.000.000	-	269.765.000		
	3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa			793.585.000	1.366.001.000	25.000.000						25.000.000	1,83	818.585.000		
	3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian			205.000.000	100.000.000							-	-	205.000.000		
		Pembelahan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota				1.600.000.000											
		Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluhan pertanian				832.832.000											
		Pengutan keterampilan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota				640.000.000											
	3.11.3.29.0.05.11.06	UNAS LINGKUNGAN HIDUP															
	3.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			10.675.587.700	1.422.377.650	-	-	-	-	-	-	RD/VI	10.675.587.700		RD/VI	
	3.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DESA/KABUPATEN/KOTA			19.677.924.873	15.659.318.252	4.611.995.933	-	-	-	-	-	4.611.995.933	23,47	24.289.920.805		
	3.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah			45.996.000	-	-	-	-	-	-	-	-	45.996.000			
	3.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			21.000.000								-	21.000.000			
	3.11.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKAS/BKPD			-									-			
	3.11.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKAS/BKPD			-									-			
	3.11.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan RKAS/BKPD			-									-			
	3.11.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKAS/BKPD			-									-			
	3.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Perubahan RKAS/BKPD			14.996.000									14.996.000			
	3.11.01.2.01.07	Kelompok Kerja Perangkat Daerah			10.000.000									10.000.000			
	3.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			10.614.956.973	9.908.840.052	3.861.559.698	-	-	-	-	-	3.861.559.698	30,30	13.676.515.771		
	3.11.01.2.02.01	Penyediaan Saluran Tol, Jalan, dan Transportasi			10.614.956.973	9.908.840.052	3.861.559.698						3.861.559.698	30,30	13.676.515.771		
	3.11.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun RKAS/BKPD			-									-			
	3.11.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan			-									-			
	3.11.01.2.06	Administrasi Perencanaan Perumahan Daerah			100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000.000			
	3.11.01.2.06.02	Penyediaan Pakaian Dinas Berserta Alat			100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000.000			
	3.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			376.100.000	170.350.000	50.840.000	-	-	-	-	-	50.840.000	24,84	426.940.000		
	3.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			26.990.000									26.990.000			
	3.11.01.2.06.02	Penyediaan Sarana dan Peralengkapan Kantor			94.120.000									94.120.000			
	3.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			95.990.000	180.000.000	29.760.000	-	-	-	-	-	29.760.000	29,76	125.230.000		
	3.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Bekalan dan Peralengkapan			75.000.000	31.350.000	10.000.000	-	-	-	-	-	10.000.000	29,34	85.000.000		
	3.11.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Baku dan Peralengkapan			40.000.000	15.000.000	6.680.000	-	-	-	-	-	6.680.000	44,53	46.680.000		
	3.11.01.2.06.09	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi BKPD			40.000.000	21.000.000	4.400.000	-	-	-	-	-	4.400.000	20,95	44.400.000		
	3.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			51.920.000	600.000.000	-	-	-	-	-	-	-	51.920.000			
	3.11.01.2.07.02	Pengadaan Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan			-	600.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-			
	3.11.01.2.07.05	Pengadaan Mobil			16.000.000									16.000.000			
	3.11.01.2.07.09	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			21.700.000									21.700.000			
	3.11.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			14.220.000									14.220.000			
	3.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.549.972.800	4.971.120.200	1.409.596.235	-	-	-	-	-	1.409.596.235	30,17	6.049.568.035		
	3.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			100.000.000	100.000.000	26.153.035	-	-	-	-	-	26.153.035	26,15	126.153.035		
	3.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			4.449.972.800	4.871.120.200	1.473.443.200	-	-	-	-	-	1.473.443.200	30,25	5.923.416.000		
	3.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.938.980.000									3.938.980.000			
	3.11.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaran Penunjang Dinas atau Kendaran Dinas			150.810.000	45.000.000	16.158.100	-	-	-	-	-	16.158.100	35,91	166.168.100		
	3.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan			3.749.190.000	3.500.000.000	1.374.903.200	-	-	-	-	-	1.374.903.200	36,28	5.124.093.200		
	3.11.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			23.780.000									23.780.000			
	3.11.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			16.000.000									16.000.000			
	3.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			185.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	185.000.000			
	3.11.02.2.01	Rencana Pertahanan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPH) Kabupaten/Kota			35.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	35.000.000			
	3.11.02.2.01.02	Penelitian dan Pelaksanaan RPPH Kabupaten/Kota			-									-			
	3.11.02.2.01.03	Penetapan RPPH Kabupaten/Kota			-									-			
	3.11.02.2.01.06	Penyusunan RPPH Kabupaten/Kota			35.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	35.000.000			
	3.11.02.2.02	Pengelolaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Dokumen kajian pertahanan dan pengelolaan lingkungan hidup yang efektif		150.000.000									150.000.000			
	3.11.02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD RPJMD			150.000.000									150.000.000			
	3.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			154.160.000	44.844.000	-	-	-	-	-	-	-	154.160.000			
				5.400.000.000													
	3.11.03.2.01	Pengelolaan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Air (IKA)		135.000.000	44.844.000	-	-	-	-	-	-	-	135.000.000			
	3.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengawasan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut			120.000.000	44.844.000								120.000.000			
	3.11.03.2.01.15	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			15.000.000									15.000.000			
	3.11.03.2.02	Panangulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Udara (IKU)		19.160.000	-	-	-	-	-	-	-	-	19.160.000			
	3.11.03.2.02.01	Pemberian Informasi Peningkatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat			19.160.000									19.160.000			
	3.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEKAMUKATAN (KAWATI) DESA/KOTA			412.718.850	78.750.000	-	-	-	-	-	-	-	412.718.850			

[illegible]

		2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				8.714.660.205	3.558.767.000	1.678.859.072		-	-	-	1.678.859.072	47,18	10.393.519.277			
		2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA				6.795.480.205,0	5.656.201.828	1.651.169.072		-	-	-	1.651.169.072	25,19	8.446.649.277			
		2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				71.850.000	-	-		-	-	-	-		71.850.000			
		2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				14.050.000									14.050.000			
		2.12.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				57.800.000									57.800.000			
		2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah				5.685.151.005	4.862.965.978	1.446.133.612		-	-	-	1.446.133.612	25,74	7.132.355.621			
		2.12.01.2.02.01	Penyediaan Sal. dan Tenaga Air				5.667.506.005	4.862.965.978	1.446.133.612		-	-	-	1.446.133.612	25,74	7.132.355.621			
		2.12.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran/SKPD				15.645.000									15.645.000			
		2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				387.275.600	237.831.850	62.345.150		-	-	-	62.345.150	26,17	389.520.750			
		2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				18.430.000									18.430.000			
		2.12.01.2.06.02	Penyediaan Perlengkapan dan Peralengkapan Kantor				85.200.000									85.200.000			
		2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				49.490.000	32.635.000	7.747.000							7.747.000			
		2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengabdian				49.335.000	36.408.850	9.628.750							9.628.750			
		2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Baku dan Perlengkapan Penunjang				17.800.000	10.000.000	4.500.000							4.500.000			
		2.12.01.2.06.09	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				95.000.000	73.800.000	11.678.000							11.678.000			
		2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-									-			
		2.12.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Peranginan Dinas atau Kendaraan Dinas Sederajat				-									-			RDIV/01
		2.12.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-									-			
		2.12.01.2.08	Pemeliharaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				444.919.200	446.944.000	123.097.310					123.097.310	27,54	568.016.510			
		2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				81.454.000	85.000.000	14.659.910							14.659.910			
		2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Urusan Kantor				361.464.000	361.944.000	108.437.400							108.437.400			
		2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				288.284.000	188.460.000	15.695.000							15.695.000			
		2.12.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Peranginan Dinas atau Kendaraan Dinas Sederajat				65.000.000	35.000.000	5.144.000							5.144.000			
		2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				196.084.000	79.460.000	14.549.000							14.549.000			
		2.12.01.2.09.10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				27.200.000									27.200.000			
		2.12.02	PROGRAM PINDAFTARAN PENDUDUK				1.452.545.000	3.428.767.000	27.690.000		-	-	-	27.690.000	0,81	1.480.235.000			
						6.430.000.000													
		2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk				67.540.000	1.115.000.000	27.690.000		-	-	-	27.690.000	2,48	95.230.000			
		2.12.02.2.01.03	Penyediaan Monev Pendaftaran Penduduk				67.540.000												
		2.12.02.2.01.04	Penyediaan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				-	1.115.000.000	27.690.000		-	-	-	27.690.000	2,48	27.690.000			
		2.12.02.2.02	Pelayanan Pendaftaran Penduduk				1.328.905.000	1.013.767.000	-		-	-	-	-		1.328.905.000			
		2.12.02.2.02.01	Penyusunan Tata Cara Pemecatan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Tertentu Pendaftaran Penduduk				-				-	-	-	-		-			
		2.12.02.2.02.02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Bilingual KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan				1.328.805.000	1.013.767.000	-		-	-	-	-		1.328.805.000			
		2.12.02.2.03	Penyediaan Jasa Pendaftaran Penduduk				56.200.000	1.300.000.000	-		-	-	-	-		56.200.000			
		2.12.02.2.03.01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Pemberian Pelayanan Pendaftaran Penduduk				-				-	-	-	-		-			
		2.12.02.2.03.02	Pelayanan secara ASIST Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pendaftaran Penduduk				56.200.000									56.200.000			
		2.12.02.2.03.03	Penyediaan Fasilitas Pendaftaran Penduduk				-	1.300.000.000								-			
		2.12.02.2.03.05	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk				-									-			
		2.12.02.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk				-									-			
		2.12.02.2.04.02	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk				-									-			
		2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL				143.285.000	-	-		-	-	-	-		143.285.000			
						1.850.000.000													
		2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil				65.190.000									65.190.000			
		2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Pendaftaran dan Penetapan Dokumen dan Pelaporan Peristiwa Penting				21.150.000									21.150.000			
		2.12.03.2.01.02	Pencatatan dan Pendaftaran Pencatatan Sipil				41.040.000									41.040.000			
		2.12.03.2.02	Penyediaan Jasa Pendaftaran Penduduk				78.095.000									78.095.000			RDIV/01
		2.12.03.2.02.04	Pelayanan secara ASIST Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pendaftaran Sipil				-									-			
		2.12.03.2.02.10	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil				78.095.000									78.095.000			
		2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				267.150.000	130.000.000	-		-	-	-	-		267.150.000			
						2.550.000.000													
						2.700.000.000													
		2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemeliharaan dan Penyajian Database Kependudukan				72.000.000	-	-		-	-	-	-		72.000.000			
		2.12.04.2.01.01	Pencatatan, Pendaftaran dan Penetapan Dokumen dan Pelaporan Peristiwa Penting				35.350.000									35.350.000			
		2.12.04.2.01.02	Pencatatan dan Pendaftaran Pencatatan Sipil				36.650.000									36.650.000			
		2.12.04.2.02	Pelayanan Pendaftaran Penduduk				-									-			
		2.12.04.2.02.01	Penyusunan Tata Cara Pemecatan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Tertentu Pendaftaran Penduduk				-									-			
		2.12.04.2.03	Penyediaan Jasa Pendaftaran Penduduk				195.150.000	130.000.000	19.500.000							19.500.000			
		2.12.04.2.03.03	Penyediaan Fasilitas Pendaftaran Penduduk				110.850.000	130.000.000	19.500.000							19.500.000			
		2.12.04.2.03.04	Penyediaan Fasilitas Pendaftaran Penduduk				28.100.000									28.100.000			
		2.12.04.2.03.05	Sosialisasi terkait Pendaftaran Penduduk				-									-			
		2.12.04.2.03.07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat				28.100.000									28.100.000			
		2.12.04.2.03.08	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Diakses				28.100.000									28.100.000			
		2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				-	-	-							-			
		2.12.04.2.04.03	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Penyelenggaraan Data Kependudukan				-									-			
		2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				56.200.000	-	-		-	-	-	-		56.200.000			
						900.000.000													
		2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan				56.200.000									56.200.000			
		2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan sesuai kebutuhan yang lain				56.200.000									56.200.000			
		2.13.000.000.000.13.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				18.375.580.368	18.375.580.368								18.375.580.368			
		2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				15.953.209.894	20.543.545.586	1.622.951.934		-	-	-	1.622.951.934	7,89	17.576.241.828			

[illegible]

	2.16.02.2.01.09	Menjembangi Komunikasi Kota			25.000.000					8.506.000		28,35		25.000.000	
	2.16.02.2.01.11	Pengaturan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik			283.000.000	30.000.000	8.506.000							291.500.000	
	2.16.02.2.01.11	Pengoptimalan Tata Kelola Kominfo Informasi & Daerah			25.000.000									25.000.000	
	2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat : Media dan Komunikasi Komunitas			100.000.000									100.000.000	
		Kemitraan komunikasi dengan komunitas informasi Masyarakat				525.000.000	179.311.500								
		Sosialisai Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik				275.644.800									
	2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Tetrahedroner pengabdian Whitney Pemerintah dan Bisnis	48.550.000.000	2.233.979.000	8.777.552.000	210.041.600			210.041.600	420,08			2.444.020.600	
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub-Domain di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			1.748.489.000	50.000.000								1.748.489.000	
	2.16.03.2.01.01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota			25.000.000									25.000.000	
	2.16.03.2.01.02	Penatausahaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub-Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			24.500.000									24.500.000	
	2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintahan Daerah			1.698.969.000									1.698.969.000	#DIV/0!
		Pengelolaan Nama Domain dan Sub-Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Eksternal Desa				50.000.000									
	2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			485.510.000	8.727.552.000	210.041.600			210.041.600	2,41			495.551.600	
	2.16.03.2.02.01	Penatausahaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			20.000.000									20.000.000	
	2.16.03.2.02.02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik			96.000.000									96.000.000	
	2.16.03.2.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintahan Daerah			57.010.000									57.010.000	
	2.16.03.2.02.06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik			20.000.000									20.000.000	
	2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik			-										
	2.16.03.2.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah			-										
	2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas			218.000.000									218.000.000	
	2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah			-										
	2.16.03.2.02.11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCO)			-										
	2.16.03.2.02.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Dokumen SPPE			74.500.000	6.642.000.000	10.725.000			10.725.000	97,86			74.500.000	
		Koordinasi Penyelenggaraan Pusat Data Nasional				10.953.000				10.725.000	97,86			10.725.000	
		Koordinasi penyelenggaraan proses bisnis				25.425.000				18.475.000	71,45			18.475.000	
		Fasilitas penyelenggaraan SPBE di lingkungan Penda				1.899.168.000				130.641.600	6,88			130.641.600	
		Penyelenggaraan jaringan intra pemerintahan daerah kab/kota				150.000.000				50.000.000	33,33			50.000.000	
		Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Mekanisme Kabupaten atau Kota Cerdas				50.000.000									
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			138.540.000	175.000.000	171.017.000	-	-	-	171.017.000	97,72		301.557.000	
	2.20.02	PROGRAM PENYELNGGERAAN STATISITK SEKTORAL	Tetrahedroner pengabdian data statistik sektoral	1.825.000.000	138.540.000	175.000.000	171.017.000	-	-	-	171.017.000	97,72		301.557.000	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Daerah Kabupaten/Kota			138.540.000	175.000.000	171.017.000	-	-	-	171.017.000	97,72		301.557.000	
	2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral			85.540.000									85.540.000	
	2.20.02.2.01.02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Monev Statistik Daerah yang Terintegrasi			25.000.000									25.000.000	
	2.20.02.2.01.03	Membantu Melatada Statistik Sektoral			20.000.000									20.000.000	
		Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional				175.000.000	171.017.000			171.017.000	97,72			171.017.000	
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			315.000.000	120.775.000	107.889.000	-	-	-	107.889.000	89,33		422.889.000	
	2.21.02	PROGRAM PENYELNGGERAAN PERANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			315.000.000	120.775.000	107.889.000	-	-	-	107.889.000	89,33		422.889.000	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tetrahedroner penyelenggaraan & Persandian untuk Pengamanan Informasi	2.775.000.000	295.000.000	120.775.000	107.889.000	-	-	-	107.889.000	89,33		402.889.000	
	2.21.02.2.01.02	Pelaksanaan Analisis Keamanan dan Pengendalian Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			250.000.000									250.000.000	
	2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik			25.000.000									25.000.000	
	2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			20.000.000	120.775.000	107.889.000			107.889.000	89,33			127.889.000	
	2.21.02.2.02	Pemetaan Pola Hubungan Komunikasi Band Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota			20.000.000	-				-		#DIV/0!		20.000.000	
	2.21.02.2.02.01	Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Band Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			20.000.000									20.000.000	
	2.17.3.30.3.31.17.00	ONAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH PERSEKUTUHAN DAN PERGAJARAN													
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			159.333.488.739	11.837.552.932	325.000.000	-	-	-	325.000.000	2,75		159.656.488.739	
	2.17.01	PROGRAM PEMBUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.265.495.000	10.238.890.092	2.979.401.746	-	-	-	2.979.401.746	29,10		5.244.896.746	
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			56.200.000	25.000.000	17.000.000	-	-	-	17.000.000	68,00		73.200.000	
	2.17.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			31.200.000	15.000.000	8.100.000				8.100.000	89,00		33.900.000	
	2.17.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Berbasis Kinerja SPPE			25.000.000	10.000.000	8.900.000				8.900.000	89,00		33.900.000	
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			-	8.827.466.465	2.511.939.685				2.511.939.685	28,48		2.511.939.685	
	2.17.01.2.02.01	Operasionalisasi dan Integrasi Sistem AKN			-	8.827.466.465	2.511.939.685				2.511.939.685	28,48		2.511.939.685	
	2.17.01.2.02	Administrasi Umum Perangkat Daerah			765.000.000	283.333.627	64.422.500	-	-	-	64.422.500	29,74		829.422.500	
	2.17.01.2.02.01	Penyusunan Laporan Instansi Lektur/Pengelolaan Berbasis Statistik			25.000.000									25.000.000	
	2.17.01.2.02.02	Penyusunan Laporan dan Pengolahan Kantor			175.000.000									175.000.000	
	2.17.01.2.02.03	Penyusunan Laporan dan Pengolahan Kantor			46.000.000									46.000.000	
	2.17.01.2.02.04	Penyusunan Laporan dan Pengolahan Kantor			106.000.000	75.000.000	26.100.000				26.100.000	14,80		132.100.000	
	2.17.01.2.02.05	Penyusunan Laporan dan Pengolahan Kantor			200.000.000	93.333.627	14.597.500				14.597.500	17,10		214.597.500	
	2.17.01.2.02.06	Penyusunan Laporan dan Pengolahan Kantor			50.000.000	45.000.000	11.580.000				11.580.000	23,17		61.580.000	
	2.17.01.2.02.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SPPE			115.000.000	50.000.000	10.785.000				10.785.000	21,57		125.785.000	
	2.17.01.2.02	Penyusunan Sarang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			124.669.200	-	-				-			124.669.200	
	2.17.01.2.02.10	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Kantor Lelutak			124.669.200									124.669.200	
	2.17.01.2.02	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			870.780.800	945.000.000	302.586.061	-	-	-	302.586.061	32,02		1.173.366.861	
	2.17.01.2.02.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			170.000.000	235.000.000	59.214.061				59.214.061	24,77		229.214.061	
	2.17.01.2.02.04	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Kantor			700.780.800	710.000.000	243.372.000				243.372.000	34,62		943.372.000	
	2.17.01.2.02.09	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			468.945.000	158.000.000	81.462.500	-	-	-	81.462.500	53,94		550.307.500	
	2.17.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan dan Pajuk Kesehatan Penunjang Urusan atau Kesehatan Urusan Lainnya			250.000.000	83.000.000	20.762.500				20.762.500	25,02		270.762.500	
	2.17.01.2.09.05	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan			25.000.000									25.000.000	
	2.17.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana			158.000.000	50.000.000	50.000.000				50.000.000	100,00		208.000.000	

	2.17.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				23.845.000	25.000.000	-	10.700.000	-	-	-	-	-	-	-	10.700.000	42,80	34.545.000						
	2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM				50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000.000						
		Peningkatan Jumlah Koperasi Aktif			625.000.000														-						
	2.17.02.2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembaruan dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota				50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000.000						
	2.17.02.2.02.01	Fasilitasi Penemuan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembaruan dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota				50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000.000						
	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
		Peningkatan Jumlah Koperasi Sehat			700.000.000														-						
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	2.17.03.2.01.04	Penaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KPUSP/KOPERASI				50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000.000						
		Peningkatan Jumlah Koperasi Sehat			600.000.000														-						
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000.000						
	2.17.04.2.01.01	Penaksanaan Penilaian Kesehatan KPUSP/Koperasi Keanggotaan Kabupaten/Kota				50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000.000						
	2.17.05	PROGRAM PENGUATAN DAN LATIHAN PERKOPORASIAN				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
		Peningkatan Jumlah Koperasi Berprestasi			700.000.000														-						
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	2.17.05.2.01.01	Penggiatan Pembelajaran dan Penguatan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SKM Koperasi				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	2.17.06	PROGRAM PEMBUDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				125.000.000	575.000.000	75.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	75.000.000	75.000.000	13,04	75.000.000					
		Peningkatan Jumlah Koperasi			1.500.000.000														-						
	2.17.06.2.01	Pembudayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota				125.000.000	575.000.000	75.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	75.000.000	75.000.000	13,04	75.000.000					
	2.17.06.2.01.05	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Monev Perbaikan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				125.000.000	575.000.000	75.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	75.000.000	75.000.000	13,04	75.000.000					
	2.17.07	PROGRAM PEMBUDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				9.106.488.739	11.112.552.932	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000.000	200.000.000	1,80	9.306.488.739					
		Peningkatan Jumlah UMKM			26.100.000.000														-						
	2.17.07.2.01	Pembudayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan Kemiskinan Komprehensif Partisipatif, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan				9.106.488.739	11.112.552.932	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000.000	200.000.000	1,80	9.306.488.739					
	2.17.07.2.01.02	Pembudayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan Kemiskinan Komprehensif Partisipatif, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan				130.000.000													-						
	2.17.07.2.01.04	Pembudayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan Kemiskinan Komprehensif Partisipatif, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan				8.631.488.739	10.812.552.932	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000.000	100.000.000	0,92	8.531.488.739					
	2.17.07.2.01.05	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Monev Perbaikan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	2.17.07.2.01.15	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Monev Perbaikan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				545.000.000	300.000.000	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000.000	100.000.000	33,33	645.000.000					
	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				150.000.000.000	150.000.000	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000.000	50.000.000	33,33	150.000.000.000					
		Peningkatan Jumlah Usaha Mikro dan Kecil			6.730.000.000														-						
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Daya Usaha Menengah Usaha Kecil				150.000.000.000	150.000.000	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000.000	50.000.000	33,33	150.000.000.000					
	2.17.08.2.01.08	Produksi dan Pengolahan, Pemasarkan, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi				150.000.000.000	150.000.000	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000.000	50.000.000	33,33	150.000.000.000					
	3.39	URUSAN PEMBENTUKAN BIDANG PENGADAAN				2.499.000.000	1.389.378.000	345.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	395.100.000	345.100.000	14,04	2.694.100.000					
	3.39.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PENGADAAN				1.875.000.000	1.034.420.000	195.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	295.100.000	195.100.000	10,23	2.070.100.000					
		Peningkatan Jumlah pasar pasar tradisional			10.050.000.000														-						
	3.39.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Tradisional				1.875.000.000	1.034.420.000	195.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	195.100.000	195.100.000	10,23	2.070.100.000					
	3.39.03.2.01.01	Pembangunan Sarana Distribusi Tradisional				1.375.000.000	664.650.000	195.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	195.100.000	195.100.000	14,23	1.570.100.000					
	3.39.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				500.000.000	369.770.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.000.000					
	3.39.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				250.000.000	199.950.000	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000.000	100.000.000	50,01	350.000.000					
		Peningkatan Jumlah pedagang pasar pasar tradisional			3.000.000.000														-						
	3.39.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Subnasional				250.000.000	199.950.000	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000.000	100.000.000	50,01	350.000.000					
	3.39.04.2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Tersegregasi				100.000.000													-						
	3.39.04.2.02.03	Penaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				150.000.000	199.950.000	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000.000	100.000.000	50,01	250.000.000					
	3.39.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
		Peningkatan Nilai Ekspor barang perdagangan			2.400.000.000														-						
	3.39.05.2.01	Pengembangan Promosi dan Mitigasi Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Tersegregasi Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	3.39.05.2.01.02	Pengembangan Promosi dan Mitigasi Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Tersegregasi Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	3.39.05.2.01.05	Pengembangan Citra Produk Ekspor				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	3.39.06	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				149.000.000	175.000.000	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000.000	50.000.000	33,57	199.000.000					
		Peningkatan Jumlah Unit - dan atau - cabang dan perwakilan dari produsen barang			677.300.000														-						
	3.39.06.2.01	Penanaman Metologi Legal Berupa Tera, Tera Utang, dan Penanaman				149.000.000	175.000.000	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000.000	50.000.000	33,57	199.000.000					
	3.39.06.2.01.01	Penanaman Metologi Legal, Berupa Tera, Tera Utang				99.000.000	160.000.000	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000.000	50.000.000	51,25	149.000.000					
	3.39.06.2.01.02	Penanaman Metologi Legal, Berupa Tera, Tera Utang				50.000.000	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000.000					
	3.39.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGARA				225.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225.000.000					

[illegible]

[illegible]

	5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			40.000.000	20.000.000	9.950.000					9.950.000	40,75	49.950.000			
	5.01.01.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Strategis Khusus SKPD			50.000.000	20.000.000	8.720.000					8.720.000	43,60	58.720.000			
	5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			297.230.000	40.000.000	-					-	-	257.230.000			
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6.903.662.788	5.881.704.580	1.799.110.491	-				1.799.110.491	36,19	8.700.773.379			
	5.01.01.2.02.01	Penyediaan Salur dan Tergantung ASN			6.878.662.788	5.873.704.580	1.793.610.491	-				1.793.610.491	36,14	8.672.273.379			
	5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			25.000.000	8.000.000	5.500.000	-				5.500.000	68,75	30.500.000			
	5.01.01.2.05	Administrasi Pengelolaan Perangkat Daerah			50.000.000	-	-	-				-	-	50.000.000			
	5.01.01.2.05.10	Subsidi: Pengalangan Perantara/Industri			50.000.000	-	-	-				-	-	50.000.000			
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			896.429.800	289.064.800	86.372.000	-				86.372.000	29,88	982.804.800			
	5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			-	10.000.000	3.000.000	-				3.000.000	30,00	3.000.000			
	5.01.01.2.06.02	Penyediaan Instalasi dan Peralatan Kantor			248.260.000	65.000.000	33.000.000	-				33.000.000	52,77	283.260.000			
	5.01.01.2.06.04	Penyediaan Sarana Logistik Kantor			292.475.000	75.064.800	18.500.000	-				18.500.000	23,65	310.979.800			
	5.01.01.2.06.05	Penyediaan Sarana Kelengkapan dan Peralatan			33.100.000	24.000.000	7.672.000	-				7.672.000	31,97	40.772.000			
	5.01.01.2.06.06	Penyediaan Sarana Binaan dan Peralatan Peningkat Pekerjaan			47.630.000	40.000.000	10.000.000	-				10.000.000	26,50	57.630.000			
	5.01.01.2.06.09	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			274.000.000	75.000.000	13.600.000	-				13.600.000	18,13	288.600.000			
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuan Pemerintah Daerah			352.193.736	370.215.480	88.520.074	-				88.520.074	23,91	440.713.810			
	5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi: Sumber Daya Air dan Listrik			105.827.336	104.984.280	22.777.074	-				22.777.074	21,22	127.904.410			
	5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			247.146.400	265.231.200	66.243.000	-				66.243.000	26,98	313.409.400		RDV/VI	
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintah Daerah			254.300.000	80.000.000	12.701.400	-				12.701.400	15,99	266.991.400			
	5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan: Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Penengangan Dinas atau Kendaraan Dinas Adhikar	1 unit		90.000.000	-	8.491.400	-				8.491.400	21,23	98.491.400			
	5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 unit		40.900.000	40.000.000	8.401.400	-				8.401.400	5,33	49.301.400			
	5.01.01.2.09.10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Balaikota Lainnya	1 unit		95.250.000	10.000.000	2.400.000	-				2.400.000	2,40	97.650.000			
	5.01.01.2.09.11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Gedung Kantor atau Balaikota Lainnya	1 unit		28.050.000	-	-	-				-	-	28.050.000			
	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			1.110.000.000	896.775.600	122.925.000	-				122.925.000	13,68	1.232.925.000			
	5.01.02.01	Penelitian dan Pengembangan			985.000.000	768.179.600	122.925.000	-				122.925.000	18,00	1.107.924.600			
	5.01.02.01.01	Analisis Kondisi Daerah: Pemetaan dan Strategi Pembangunan Daerah			-	-	-	-				-	-	-			
	5.01.02.01.02	Koordinasi Perencanaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya			-	-	-	-				-	-	-			
	5.01.02.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik			50.000.000	39.990.000	36.050.000	-				36.050.000	90,15	86.050.000			
	5.01.02.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah			-	-	-	-				-	-	-			
	5.01.02.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Kota			125.000.000	58.649.600	-	-				-	-	125.000.000			
	5.01.02.01.06	Pengelolaan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan			50.000.000	30.400.000	-	-				-	-	50.000.000			
	5.01.02.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota			760.000.000	639.140.000	86.875.000	-				86.875.000	13,29	846.875.000			
	5.01.02.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			75.000.000	82.600.000	-	-				-	-	75.000.000		RDV/VI	
	5.01.02.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah			50.000.000	55.600.000	-	-				-	-	50.000.000		RDV/VI	
	5.01.02.02.02	Penyusunan dan Penetapan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD			25.000.000	27.000.000	-	-				-	-	25.000.000			
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			50.000.000	48.000.000	-	-				-	-	50.000.000			
	5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota			-	-	-	-				-	-	-			
	5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkas Pelaksanaan Pembangunan Daerah			50.000.000	48.000.000	-	-				-	-	50.000.000			
	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINERGISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			1.225.829.400	582.057.600	131.070.500	-				131.070.500	1,356.899.900				
	5.01.03.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			428.000.000	203.120.000	37.010.000	-				37.010.000	18,22	457.010.000			
	5.01.03.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RPJPH)			180.000.000	47.720.000	10.600.000	-				10.600.000	25,11	190.600.000			
	5.01.03.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			-	-	-	-				-	-	-			
	5.01.03.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			-	3.320.000	630.000	-				630.000	18,98	630.000			
	5.01.03.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan			25.000.000	12.000.000	4.700.000	-				4.700.000	39,17	29.700.000			
	5.01.03.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RPJPH)			38.000.000	38.040.000	7.025.000	-				7.025.000	18,47	37.025.000			
	5.01.03.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia			60.000.000	-	-	-				-	-	60.000.000			
	5.01.03.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia			-	13.440.000	1.145.000	-				1.145.000	8,54	1.145.000			
	5.01.03.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia			125.000.000	84.130.000	12.910.000	-				12.910.000	13,72	137.910.000			
	5.01.03.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			401.749.400	182.717.600	48.171.000	-				48.171.000	26,36	449.920.400			
	5.01.03.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RPJPH)			99.999.000	33.000.000	18.600.000	-				18.600.000	56,52	118.649.000			
	5.01.03.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian			25.000.000	23.000.000	-	-				-	-	25.000.000			
	5.01.03.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian			15.000.000	6.000.000	-	-				-	-	15.000.000			
	5.01.03.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian			95.000.000	18.766.000	5.841.000	-				5.841.000	31,13	100.841.000			
	5.01.03.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RPJPH)			35.000.000	32.000.000	10.760.000	-				10.760.000	23,63	45.760.000			
	5.01.03.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA			25.000.000	21.931.600	-	-				-	-	25.000.000			
	5.01.03.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA			15.000.000	16.000.000	-	-				-	-	15.000.000			
	5.01.03.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA			91.749.600	32.000.000	12.910.000	-				12.910.000	40,38	104.669.600			
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			404.080.000	196.220.000	45.889.500	-				45.889.500	23,39	449.969.500			
	5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RPJPH)			75.000.000	24.000.000	13.207.500	-				13.207.500	55,03	88.207.500			
	5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			20.000.000	24.000.000	5.130.000	-				5.130.000	21,38	25.130.000			
	5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			30.000.000	11.000.000	1.120.000	-				1.120.000	10,18	31.120.000			
	5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur			56.000.000	37.880.000	4.005.000	-				4.005.000	12,18	60.005.000			
	5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RPJPH)			75.000.000	25.240.000	13.692.000	-				13.692.000	54,25	88.692.000			
	5.01.03.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan			20.000.000	24.000.000	5.025.000	-				5.025.000	20,64	25.025.000			
	5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan			27.600.000	11.440.000	1.260.000	-				1.260.000	11,01	28.860.000			
	5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan			100.480.000	43.110.000	2.400.000	-				2.400.000	5,66	102.910.000			
	5.05	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENELITIAN DAN PENGENDALIAN			110.000.000	81.000.000	-	-				-	-	110.000.000			

		5.65.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			110.000.000	83.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110.000.000		
		5.65.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi			110.000.000	83.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110.000.000		
		5.65.02.2.04.04	Struktur dan Desain Alat-Hast Kefitangan	Jumlah Kajian	12.190.000.000	110.000.000	83.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110.000.000		
		5.62.0.00.0.00.24.00	BAGIAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			526.775.838.824	514.891.777.675	49.011.674.646								5,32	575.786.713.470		
		5.02	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI KEUANGAN			5.815.394.000	4.571.409.875	812.270.625								17,77	6.627.664.625		
		5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			15.704.974.209	12.973.986.267	3.209.100.239								3.209.100.239	18.914.074.448		
		5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			75.000.000	61.000.000	23.131.000								37,52	96.131.000		
		5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Analisis Strategis Kinerja SKPD			75.000.000	61.000.000	23.131.000								37,52	96.131.000		
		5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			12.138.406.699	10.311.081.337	2.364.114.189								23,93	14.502.520.798		
		5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			12.138.406.699	10.311.081.337	2.364.114.189								23,93	14.502.520.798		
		5.02.01.2.02.05	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			890.000.000	100.000.000	85.000.000								85,00	85.000.000		
		5.02.01.2.02.09	Pengadaan Barang-Dinas Secara Akrif			-	-	-								-	-		
		5.02.01.2.02.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			-	-	-								-	-		
		5.02.01.2.02.10	Subsidi dan Bantuan Keuangan			800.000.000	100.000.000	85.000.000								85,00	85.000.000		
		5.02.01.2.05.11	Bantuan Teknis, Instrumen dan Perlakuan Penunjang Lainnya			-	-	-								-	-		
		5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			996.000.000	615.500.000	313.075.675								30,87	1.309.075.675		
		5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Gedung			16.000.000	21.000.000	6.000.000								27,69	22.900.000		
		5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			200.000.000	78.000.000	38.600.000								49,49	238.600.000		
		5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			150.000.000	75.000.000	38.000.000								37,33	128.000.000		
		5.02.01.2.06.05	Penyediaan Sarana Cetak dan Pengangsan			400.000.000	50.000.000	20.725.675								51,92	490.725.675		
		5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Baku dan Perlakuan Perundang-undangan			80.000.000	37.500.000	21.605.000								57,61	101.605.000		
		5.02.01.2.06.09	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			150.000.000	50.000.000	15.245.000								30,49	165.245.000		
		5.02.01.2.06.10	Penyusunan Anggaran Dinas atau SKPD			-	-	-								-	-		
		5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			259.970.000	85.800.000	-								-	259.970.000		
		5.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kantor atau Bangunan Lainnya			259.970.000	85.800.000	-								-	259.970.000		
		5.02.01.2.07.11	Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.026.997.600	1.071.204.930	325.830.465								30,42	1.346.424.000		
		5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			285.000.000	300.107.330	87.031.265								29,00	372.031.265		
		5.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Pengisian dan Perawatan Kendaraan			-	-	-								-	-		
		5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			733.597.600	723.597.600	238.799.200								31,00	974.396.800		
		5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			415.000.000	729.400.000	97.948.910								13,43	1.514.948.910		
		5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			175.000.000	200.000.000	52.073.932								26,04	227.073.932		
		5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			100.000.000	102.000.000	19.750.000								19,75	219.750.000		
		5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			140.000.000	167.400.000	26.124.978								19,43	166.124.978		
		5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-	200.000.000	-								-	-		
		5.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-	200.000.000	-								-	-		
		5.62.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			5.815.394.000	4.571.409.875	812.270.625								17,77	6.627.664.625	ROI/01	
		5.62.04.2.01	Revisi Pengelolaan pendapatan Daerah			5.815.394.000	4.571.409.875	812.270.625								17,77	6.627.664.625		
		5.62.04.2.01.01	Perencanaan, pengendalian pajak daerah			50.000.000	50.000.000	14.123.000								28,03	64.123.000		
		5.62.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyesuaian Kebijakan Pajak Daerah			262.400.000	37.500.000	19.750.000								52,68	282.150.000		
		5.62.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah			400.000.000	241.100.000	93.700.000								38,85	493.700.000		
		5.62.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah			82.594.000	222.700.000	74.365.000								33,39	156.965.000		
		5.62.04.2.01.05	Pengisian dan Pengisian Check Pajak Daerah			500.000.000	500.000.000	5.000.000								0,85	505.000.000		
		5.62.04.2.01.06	Pengisian, Pemeliharaan, dan Pasokan Basis Data Pajak Daerah			205.000.000	204.236.250	505.439.625								247,51	710.439.625		
		5.62.04.2.02.07	Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBPT) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)			3.200.000.000	1.608.005.621	38.000.000								2,36	3.238.000.000		
		5.62.04.2.02.08	Pengisian Pajak Daerah			710.000.000	773.250.000	12.526.000								1,42	812.526.000		
		5.62.04.2.01.09	Penelitian dan Konsultasi Pajak Daerah			100.000.000	100.000.000	10.000.000								10,00	110.000.000		
		5.62.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah			200.000.000	23.500.000	24.900.000								12,45	224.900.000		
		5.62.04.2.01.11	Pengisian Pajak Daerah			584.000.000	118.000.000	584.000.000								100,00	584.000.000		
		5.62.04.2.01.12	Pengisian, Ketersihan Pajak Daerah			-	-	-								-	-		
		5.62.04.2.01.13	Pengisian, Pemeliharaan dan Pengisian Pajak Daerah			100.000.000	100.000.000	7.047.000								7,05	107.047.000		
		5.62.04.2.01.14	Pemilihan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			60.000.000	52.000.000	6.115.000								10,17	66.115.000		
		5.62.0.00.0.00.26.00	BAGIAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH																
		5.02	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI KEUANGAN			520.959.644.824	518.230.367.800	48.199.404.021								9,45	569.159.048.845		
		5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			12.258.267.422	7.613.638.182	2.453.769.289								32,23	14.712.036.711		
		5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			65.000.000	35.000.000	35.000.000								53,08	90.000.000		
		5.02.01.2.02.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Analisis Strategis Kinerja SKPD			65.000.000	35.000.000	35.000.000								53,08	90.000.000		
		5.02.01.2.02.09	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6.480.271.422	5.216.114.222	1.584.849.289								30,18	7.981.120.711		
		5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			6.478.271.422	5.216.114.222	1.584.849.289								30,18	7.981.120.711		
		5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			25.000.000	-	25.000.000								100,00	25.000.000		
		5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.710.496.000	1.001.040.000	600.914.900								60,80	2.311.410.900		
		5.02.01.2.06.02	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			775.000.000	413.840.000	247.487.000								53,97	1.122.487.000		
		5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			235.000.000	160.000.000	88.400.000								37,40	393.400.000		
		5.02.01.2.06.05	Penyediaan Sarana Cetak dan Pengangsan			250.000.000	160.000.000	108.127.400								43,28	358.127.400		
		5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Baku dan Perlakuan Perundang-undangan			168.500.000	120.000.000	28.320.000								16,85	188.820.000		
		5.02.01.2.06.09	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			289.996.000	147.200.000	48.300.000								32,81	338.296.000		
		5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.300.000.000	-	-								-	1.300.000.000		
		5.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			1.300.000.000	-	-								-	1.300.000.000		
		5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			650.000.000	542.019.300	170.254.350								31,41	820.254.350		
		5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			50.000.000	18.140.000	1.649.550								3,29	51.649.550		
		5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			600.000.000	523.879.200	168.604.800								30,18	768.604.800		
		5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.129.500.000	829.456.700	72.750.750								8,77	2.202.256.750		
		5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			350.000.000	100.000.000	19.626.750								19,63	369.626.750		
		5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			229.500.000	50.000.000	18.400.000								36,28	247.600.000		
		5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana			1.508.000.000	657.456.700	26.234.000								1,99	1.526.234.000		
		5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			50.000.000	-	-								-	-		
		5.62.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			518.759.645.824	508.213.658.100	47.987.754.021								2.117,28	566.747.399.045		
		5.62.02.2.01	Revisi Pengelolaan keuangan Daerah			518.759.645.824	508.213.658.100	47.987.754.021								2.117,28	566.747.399.045		
		5.62.02.2.01.01	Perencanaan, pengendalian keuangan daerah			50.000.000	50.000.000	14.123.000					</						

5.03.02.2.01.08	Facilitator Lembaga Profesi ASN	275.000.000	225.000.000	200.000.000	-	-	-	200.000.000	88,89	475.000.000	-
5.03.02.2.01.09	Penyediaan Sistem Informasi Kepegawaian	130.000.000	135.538.000	15.538.000	-	-	-	15.538.000	11,93	145.500.000	-
5.03.02.2.01.11	Pengembangan Data Kepegawaian	20.000.000	37.125.000	17.125.000	-	-	-	17.125.000	85,63	20.000.000	-
5.03.02.2.02.01	Musai dan Promosi ASN	235.000.000	468.787.200	237.445.000	-	-	-	237.445.000	101,44	492.445.000	-
5.03.02.2.02.02	Penyediaan Mutasi ASN	50.000.000	1.720.000.000	-	-	-	-	-	-	50.000.000	-
5.03.02.2.02.03	Penyediaan Seleksi Penerimaan ASN	124.000.000	115.365.000	-	-	-	-	-	-	124.000.000	-
5.03.02.2.02.04	Penyediaan Promosi ASN	25.000.000	235.762.200	237.445.000	-	-	-	237.445.000	95,39	262.445.000	-
5.03.02.2.02.05	Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi ASN	201.367.200	337.187.200	34.795.000	-	-	-	34.795.000	17,29	236.162.200	-
5.03.02.2.03.01	Penyediaan Kajian Kebutuhan ASN	85.262.000	76.753.000	-	-	-	-	-	-	85.262.000	-
5.03.02.2.03.02	Penyediaan Assessment Center	-	96.150.000	-	-	-	-	-	-	-	-
5.03.02.2.03.03	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	25.000.000	26.470.000	-	-	-	-	-	-	25.000.000	-
5.03.02.2.03.04	Facilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	90.000.000	40.497.200	14.795.000	-	-	-	14.795.000	16,44	104.795.000	-
5.03.02.2.03.05	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	-	63.955.000	15.000.000	-	-	-	15.000.000	23,46	-	-
5.03.02.2.04	Penelitian dan Evaluasi Kinerja Asesor	230.000.000	420.117.200	11.240.000	-	-	-	11.240.000	4,90	261.240.000	-
5.03.02.2.04.01	Penyusunan Kebijakan Penelitian dan Evaluasi Kinerja Asesor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penelitian dan Evaluasi Kinerja Asesor	66.000.000	-	-	-	-	-	-	-	66.000.000	-
5.03.02.2.04.03	Evaluasi Hasil Penelitian dan Evaluasi Kinerja Asesor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.03.02.2.04.04	Pengembangan Penelitian Pengembangan Bagi Pegawai	67.000.000	164.075.000	20.000.000	-	-	-	20.000.000	30,00	87.000.000	-
5.03.02.2.04.05	Pengembangan Tambahan Bagi Pegawai	-	17.122.200	-	-	-	-	-	-	-	-
5.03.02.2.04.06	Penyediaan Diseminasi ASN	57.000.000	108.700.000	-	-	-	-	-	-	57.000.000	-
5.03.02.2.04.07	Penyediaan Penyelesaian Penyelesaian Diseminasi ASN	60.000.000	67.000.000	1.160.000	-	-	-	1.160.000	1,93	11.160.000	-
5.03.02.2.04.08	Penyediaan Penyelesaian Penyelesaian Diseminasi ASN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04	URUSAN PENCANAAN DAN PELAYANAN	550.000.000	1.038.190.000	46.885.000	-	-	-	46.885.000	8,52	596.885.000	-
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DATA	550.000.000	1.018.190.000	46.885.000	-	-	-	46.885.000	8,52	596.885.000	-
5.04.02.01	Penyusunan Kebijakan Penelitian dan Evaluasi Kinerja Asesor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04.02.01.01	Penyusunan Kebijakan Penelitian dan Evaluasi Kinerja Asesor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04.02.01.02	Penyusunan Kebijakan Penelitian dan Evaluasi Kinerja Asesor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04.02.01.03	Penyusunan Kebijakan Penelitian dan Evaluasi Kinerja Asesor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04.02.01.04	Penyusunan Kebijakan Penelitian dan Evaluasi Kinerja Asesor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04.02.01.05	Penyusunan Kebijakan Penelitian dan Evaluasi Kinerja Asesor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04.02.01.06	Penyusunan Kebijakan Penelitian dan Evaluasi Kinerja Asesor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04.02.01.07	Penyusunan Kebijakan Penelitian dan Evaluasi Kinerja Asesor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04.02.01.08	Penyusunan Kebijakan Penelitian dan Evaluasi Kinerja Asesor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04.02.01.09	Penyusunan Kebijakan Penelitian dan Evaluasi Kinerja Asesor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04.02.01.10	Penyusunan Kebijakan Penelitian dan Evaluasi Kinerja Asesor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04.02.02	Penyusunan Kebijakan Penelitian dan Evaluasi Kinerja Asesor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04.02.02.01	Penyusunan Kebijakan Penelitian dan Evaluasi Kinerja Asesor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04.02.02.02	Penyusunan Kebijakan Penelitian dan Evaluasi Kinerja Asesor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04.02.02.03	Penyusunan Kebijakan Penelitian dan Evaluasi Kinerja Asesor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04.02.02.04	Penyusunan Kebijakan Penelitian dan Evaluasi Kinerja Asesor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04.02.02.05	Penyusunan Kebijakan Penelitian dan Evaluasi Kinerja Asesor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04.02.02.06	Penyusunan Kebijakan Penelitian dan Evaluasi Kinerja Asesor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04.02.02.07	Penyusunan Kebijakan Penelitian dan Evaluasi Kinerja Asesor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04.02.02.08	Penyusunan Kebijakan Penelitian dan Evaluasi Kinerja Asesor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04.02.02.09	Penyusunan Kebijakan Penelitian dan Evaluasi Kinerja Asesor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04.02.02.10	Penyusunan Kebijakan Penelitian dan Evaluasi Kinerja Asesor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04.02.02.11	Penyusunan Kebijakan Penelitian dan Evaluasi Kinerja Asesor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04.02.02.12	Penyusunan Kebijakan Penelitian dan Evaluasi Kinerja Asesor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04.02.02.13	Penyusunan Kebijakan Penelitian dan Evaluasi Kinerja Asesor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04.02.02.14	Penyusunan Kebijakan Penelitian dan Evaluasi Kinerja Asesor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04.02.02.15	Penyusunan Kebijakan Penelitian dan Evaluasi Kinerja Asesor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04.02.02.16	Penyusunan Kebijakan Penelitian dan Evaluasi Kinerja Asesor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04.02.02.17	Penyusunan Kebijakan Penelitian dan Evaluasi Kinerja Asesor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04.02.02.18	Penyusunan Kebijakan Penelitian dan Evaluasi Kinerja Asesor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04.02.02.19	Penyusunan Kebijakan Penelitian dan Evaluasi Kinerja Asesor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04.02.02.20	Penyusunan Kebijakan Penelitian dan Evaluasi Kinerja Asesor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04.02.02.21	Penyusunan Kebijakan Penelitian dan Evaluasi Kinerja Asesor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04.02.02.22	Penyusunan Kebijakan Penelitian dan Evaluasi Kinerja Asesor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04.02.02.23	Penyusunan Kebijakan Penelitian dan Evaluasi Kinerja Asesor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04.02.02.24	Penyusunan Kebijakan Penelitian dan Evaluasi Kinerja Asesor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04.02.02.25	Penyusunan Kebijakan Penelitian dan Evaluasi Kinerja Asesor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04.02.02.26	Penyusunan Kebijakan Penelitian dan Evaluasi Kinerja Asesor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04.02.02.27	Penyusunan Kebijakan Penelitian dan Evaluasi Kinerja Asesor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04.02.02.28	Penyusunan Kebijakan Penelitian dan Evaluasi Kinerja Asesor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04.02.02.29	Penyusunan Kebijakan Penelitian dan Evaluasi Kinerja Asesor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04.02.02.30	Penyusunan Kebijakan Penelitian dan Evaluasi Kinerja Asesor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04.02.02.31	Penyusunan Kebijakan Penelitian dan Evaluasi Kinerja Asesor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04.02.02.32	Penyusunan Kebijakan Penelitian dan Evaluasi Kinerja Asesor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04.02.02.33	Penyusunan Kebijakan Penelitian dan Evaluasi Kinerja Asesor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04.02.02.34	Penyusunan Kebijakan Penelitian dan Evaluasi Kinerja Asesor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04.02.02.35	Penyusunan Kebijakan Penelitian dan Evaluasi Kinerja Asesor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04.02.02.36	Penyusunan Kebijakan Penelitian dan Evaluasi Kinerja Asesor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04.02.02.37	Penyusunan Kebijakan Penelitian dan Evaluasi Kinerja Asesor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04.02.02.38	Penyusunan Kebijakan Penelitian dan Evaluasi Kinerja Asesor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04.02.02.39	Penyusunan Kebijakan Penelitian dan Evaluasi Kinerja Asesor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04.02.02.40	Penyusunan Kebijakan Penelitian dan Evaluasi Kinerja Asesor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04.02.02.41	Penyusunan Kebijakan Penelitian dan Evaluasi Kinerja Asesor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04.02.02.42	Penyusunan Kebijakan Penelitian dan Evaluasi Kinerja Asesor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04.02.02.43	Penyusunan Kebijakan Penelitian dan Evaluasi Kinerja Asesor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04.02.02.44	Penyusunan Kebijakan Penelitian dan Evaluasi Kinerja Asesor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04.02.02.45	Penyusunan Kebijakan Penelitian dan Evaluasi Kinerja Asesor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04.02.02.46	Penyusunan Kebijakan Penelitian dan Evaluasi Kinerja Asesor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04.02.02.47	Penyusunan Kebijakan Penelitian dan Evaluasi Kinerja Asesor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04.02.02.48	Penyusunan Kebijakan Penelitian dan Evaluasi Kinerja Asesor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04.02.02.49	Penyusunan Kebijakan Penelitian dan Evaluasi Kinerja Asesor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04.02.02.50	Penyusunan Kebijakan Penelitian dan Evaluasi Kinerja Asesor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04.02.02.51	Penyusunan Kebijakan Penelitian dan Evaluasi Kinerja Asesor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04.02.02.52	Penyusunan Kebijakan Penelitian dan Evaluasi Kinerja Asesor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04.02.02.53	Penyusunan Kebijakan Penelitian dan Evaluasi Kinerja Asesor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04.02.02.54	Penyusunan Kebijakan Penelitian dan Evaluasi Kinerja Asesor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04.02.02.55	Penyusunan Kebijakan Penelitian dan Evaluasi Kinerja Asesor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04.02.02.56	Penyusunan Kebijakan Penelitian dan Evaluasi Kinerja Asesor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04.02.02.57	Penyusunan Kebijakan Penelitian dan Evaluasi Kinerja Asesor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04.02.02.58	Penyusunan Kebijakan Penelitian dan Evaluasi Kinerja Asesor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04.02.02.59	Penyusunan Kebijakan Penelitian dan Evaluasi Kinerja Asesor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04.02.02.60	Penyusunan Kebijakan Penelitian dan Evaluasi Kinerja Asesor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04.02.02.61	Penyusunan Kebijakan Penelitian dan Evaluasi Kinerja Asesor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04.02.02.62	Penyusunan Kebijakan Penelitian dan Evaluasi Kinerja Asesor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04.02.02.63	Penyusunan Kebijakan Penelitian dan Evaluasi Kinerja Asesor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04.02.02.64	Penyusunan Kebijakan Penelitian dan Evaluasi Kinerja Asesor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04.02.02.65	Penyusunan Kebijakan Penelitian dan Evaluasi Kinerja Asesor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04.02.02.66	Penyusunan Kebijakan Penelitian dan Evaluasi Kinerja Asesor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04.02.02.67	Penyusunan Kebijakan Penelitian dan Evaluasi Kinerja Asesor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04.02.02.68	Penyusunan Kebijakan Penelitian dan Evaluasi Kinerja Asesor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04.02.02.69	Penyusunan Kebijakan Penelitian dan Evaluasi Kinerja Asesor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04.02.02.70	Penyusunan Kebijakan Penelitian dan Evaluasi Kinerja Asesor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04.02.02.71	Penyusunan Kebijakan Penelitian dan Evaluasi Kinerja Asesor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04.02.02.72	Penyusunan Kebijakan Penelitian dan Evaluasi Kinerja Asesor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04.02.02.73	Penyusunan Kebijakan Penelitian dan Evaluasi Kinerja Asesor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04.02.02.74	Penyusunan Kebijakan Penelitian dan Evaluasi Kinerja Asesor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04.02.02.75	Penyusunan Kebijakan Penelitian dan Evaluasi Kinerja Asesor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04.02.02.76	Penyusunan Kebijakan Penelitian dan Evaluasi Kinerja Asesor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04.02.02.77	Penyusunan Kebijakan Penelitian dan Evaluasi Kinerja Asesor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04.02.02.78	Penyusunan Kebijakan Penelitian dan Evaluasi Kinerja Asesor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04.02.02.79	Penyusunan Kebijakan Penelitian dan Evaluasi Kinerja Asesor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04.02.02.80	Penyusunan Kebijakan Penelitian dan Evaluasi Kinerja Asesor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04.02.02.81	Penyusunan Kebijakan Penelitian dan Evaluasi Kinerja Asesor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04.02.02.82	Penyusunan Kebijakan Penelitian dan Evaluasi Kinerja Asesor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04.02.02.83	Penyusunan Kebijakan Penelitian dan Evaluasi Kinerja Asesor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04.02.02.84	Penyusunan Kebijakan Penelitian dan Evaluasi Kinerja Asesor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04.02.02.85	Penyusunan Kebijakan Penelitian dan Evaluasi Kinerja Asesor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04.02.02.86	Penyusunan Kebijakan Penelitian dan Evaluasi Kinerja Asesor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04.02.02.87	Penyusunan Kebijakan Penelitian dan Evaluasi Kinerja Asesor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04.02.02.88	Penyusunan Kebijakan Penelitian dan Evaluasi Kinerja Asesor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04.02.02.89	Penyusunan Kebijakan Penelitian dan Evaluasi Kinerja Asesor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04.02.02.90	Penyusunan Kebijakan Penelitian dan Evaluasi Kinerja Asesor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04.02.02.91	Penyusunan Kebijakan Penelitian dan Evaluasi Kinerja Asesor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04.02.02.92	Penyusunan Kebijakan Penelitian dan Evaluasi Kinerja Asesor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04.02.02.93	Penyusunan Kebijakan Penelitian dan Evaluasi Kinerja Asesor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04.02.02.94	Penyusunan Kebijakan Penelitian dan Evaluasi Kinerja Asesor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04.02.02.95	Penyusunan Kebijakan Penelitian dan Evaluasi Kinerja Asesor	-	-	-	-	-	-				

4.01.01.13.01	Pengadaan Ketersediaan dan Analisis Jabatan	224.999.000	187.609.000	20.080.000	-	-	-	20.080.000	10.36	245.079.800	-
4.01.01.13.02	Facilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	225.000.000	101.338.000	-	-	-	-	-	21	225.000.000	-
4.01.01.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	224.999.000	124.000.000	10.110.000	-	-	-	10.110.000	8,18	235.109.000	-
4.01.01.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	100.000.000	30.245.000	15.000.000	-	-	-	15.000.000	48,94	115.000.000	-
4.01.01.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	224.999.000	45.000.000	-	-	-	-	-	-	224.999.000	-
4.01.01.14	Peleaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1.050.000.000	1.277.500.000	639.715.000	-	-	-	639.715.000	50,08	5.689.715.000	-
4.01.01.14.01	Facilitasi Komunikasi	500.000.000	85.325.000	7.500.000	-	-	-	7.500.000	8,79	507.500.000	-
4.01.01.14.02	Facilitasi Komunikasi Pimpinan	2.050.000.000	1.105.875.000	632.215.000	-	-	-	632.215.000	57,47	2.682.115.000	-
4.01.01.14.03	Pengkoordinasian Tugas Pimpinan	500.000.000	86.300.000	-	-	-	-	-	-	500.000.000	-
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESELAKTERANGAN BOKAT	25.210.500.000	17.737.700.500	1.649.174.892	-	-	-	1.649.174.892	212,50	26.859.674.892	-
4.01.02.01	Administrasi Tata Pemerintahan	1.100.000.000	775.100.000	407.000.000	-	-	-	407.000.000	37,48	2.007.000.000	-
4.01.02.01.01	Penyusunan Administrasi Pemerintahan	275.000.000	75.100.000	27.000.000	-	-	-	27.000.000	27,81	297.000.000	-
4.01.02.01.02	Pembinaan Administrasi Kesejahteraan	400.000.000	297.000.000	297.000.000	-	-	-	297.000.000	100,00	807.000.000	-
4.01.02.01.03	Facilitasi, Penyelenggaraan dan Evaluasi	1.425.000.000	600.000.000	90.000.000	-	-	-	90.000.000	6,32	1.515.000.000	-
4.01.02.02	Peleaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	21.360.500.000	16.415.500.500	1.292.174.892	-	-	-	1.292.174.892	7,91	22.652.674.892	-
4.01.02.02.01	Facilitasi Pelayanan Rincin Mental Sosial	20.370.500.000	15.147.400.500	1.139.174.892	-	-	-	1.139.174.892	7,32	21.509.674.892	-
4.01.02.02.02	Peleaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja	990.000.000	839.000.000	63.000.000	-	-	-	63.000.000	34,55	1.053.000.000	-
4.01.02.02.03	Peleaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja	1.478.000.000	433.100.000	-	-	-	-	-	-	1.478.000.000	-
4.01.02.02.06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan Untuk Menjadi Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	275.000.000	75.000.000	-	-	-	-	63.000.000	15,83	338.000.000	-
4.01.02.03	Facilitasi dan Koordinasi Hukum	1.000.000.000	398.100.000	40.000.000	-	-	-	40.000.000	10,05	1.040.000.000	-
4.01.02.03.01	Facilitasi Pelayanan Produk Hukum Daerah	300.000.000	125.000.000	24.750.000	-	-	-	24.750.000	19,90	324.750.000	-
4.01.02.03.02	Facilitasi Bantuan Hukum	400.000.000	145.100.000	15.250.000	-	-	-	15.250.000	19,23	415.250.000	-
4.01.02.03.03	Pengkoordinasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	300.000.000	124.000.000	-	-	-	-	-	-	300.000.000	-
4.01.02.04	Facilitasi Masyarakat Daerah	350.000.000	144.000.000	-	-	-	-	-	-	350.000.000	-
4.01.02.04.01	Facilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	350.000.000	144.000.000	-	-	-	-	-	-	350.000.000	-
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.192.493.500	2.233.333.750	259.875.000	-	-	-	259.875.000	11,64	4.452.368.500	-
4.01.03.01	Peleaksanaan Kebijakan Perencanaan	567.488.000	449.257.750	159.408.500	-	-	-	159.408.500	36,04	726.896.500	-
4.01.03.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi	162.065.000	63.750.000	-	-	-	-	-	-	162.065.000	-
4.01.03.01.02	Penyusunan dan Distribusi Perencanaan	400.000.000	285.507.750	71.014.000	-	-	-	71.014.000	17,75	471.014.000	-
4.01.03.01.03											


Ir. USEP SUMIRAT
Pembina Utama Muda
NIP. 19670118 199403 1 005

EVALUASI TERHADAP RKPD
KABUPATEN KUNINGAN
TAHUN 2025

No	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu anggaran	Belanja Pegawai	Realisasi	% Fisik	Predikat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	URUSAN WAJIB	675.787.463.318		24.135.488.516	15,69	Sangat Rendah
1	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	571.764.279.773		13.221.461.459	13,67	Sangat Rendah
1	Pendidikan	213.633.995.775		863.634.853	0,40	Sangat Rendah
2	Kesehatan	199.768.402.025		5.131.673	0,00	Sangat Rendah
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	95.095.317.323		7.885.601.221	8,29	Sangat Rendah
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	58.855.093.650		2.460.633.712	4,18	Sangat Rendah
5	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	4.051.471.000		1.929.050.000	47,61	Sangat Rendah
6	Sosial	360.000.000		77.410.000	21,50	Sangat Rendah
II	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	104.023.183.545		10.914.027.057	17,72	Sangat Rendah
1	Tenaga Kerja	300.000.000		33.850.000	11,28	Sangat Rendah
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	553.160.000		-	0,00	Sangat Rendah
3	Pangan	5.921.166.448		378.690.075	6,40	Sangat Rendah
4	Pertanahan	50.000.000		-	0,00	Sangat Rendah
5	Lingkungan Hidup	1.422.377.650		-	0,00	Sangat Rendah
6	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	3.558.767.000		1.678.859.072	47,18	Sangat Rendah
7	Pemberdayaan Masyarakat Desa	18.375.580.368		1.622.951.934	8,83	Sangat Rendah
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11.004.820.000		261.510.000	2,38	Sangat Rendah
9	Perhubungan	19.981.548.526		5.156.122.876	25,80	Sangat Rendah
10	Komunikasi dan Informatika	9.798.684.800		423.137.100	4,32	Sangat Rendah
11	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	11.837.552.932		325.000.000	2,75	Sangat Rendah
12	Penanaman Modal	956.521.000		5.000.000	0,52	Sangat Rendah
13	Keperawatan dan Olahraga	15.976.455.871		750.000.000	4,69	Sangat Rendah
14	Statistik	175.000.000		171.017.000	97,72	Sangat Tinggi
15	Kebudayaan	2.240.773.950		-	0,00	Sangat Rendah
16	Perpustakaan	1.750.000.000		-	0,00	Sangat Rendah
17	Kearsipan	-		-	-	-
18	Persandian	120.775.000		107.889.000	89,33	Tinggi
III	URUSAN PILIHAN	24.696.076.390		536.614.500	8,77	Sangat Rendah
1	Kelautan dan Perikanan	2.926.066.850		291.514.500	9,96	Sangat Rendah
2	Pariwisata	252.111.000		50.000.000	19,83	Sangat Rendah
3	Pertanian	19.628.438.540		-	0,00	Sangat Rendah
4	Kehutanan					
5	Energi dan Sumberdaya Mineral					
6	Perdagangan	1.389.370.000		195.100.000	14,04	Sangat Rendah
7	Perindustrian	500.090.000		-	0,00	Sangat Rendah
8	Transmigrasi	-		-	-	-
IV	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	525.968.972.475		50.258.505.646	8,04	Sangat Rendah
1	Administrasi Pemerintahan				0,00	Sangat Rendah
2	Pengawasan				0,00	Sangat Rendah
3	Perencanaan	1.480.837.200		253.995.500	17,15	Sangat Rendah
4	Keuangan	514.801.777.675		49.011.674.646	9,52	Sangat Rendah
5	Kepegawaian	2.029.861.600		567.039.500	27,93	Sangat Rendah
6	Penelitian dan Pengembangan	110.000.000		-	0,00	Sangat Rendah
7	Pendidikan dan Pelatihan	500.000.000		46.885.000	9,38	Sangat Rendah
8	Penanggulangan Bencana	1.149.731.000		27.650.000	2,40	Sangat Rendah
9	Inspektorat	5.896.765.000		351.261.000	5,96	Sangat Rendah
V	PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	88.802.114.860		19.074.883.300	23,01	Sangat Rendah
1	Sekretariat Daerah	66.584.232.610		13.607.010.300	20,44	Sangat Rendah
2	Sekretariat DPRD	13.490.085.000		3.473.705.000	25,75	Sangat Rendah
3	Urusan Bangsa dan Politik	8.727.797.250		1.994.168.000	22,85	Sangat Rendah
VI	PEMERINTAHAN UMUM KEWILAYAHAN	80.479.089.648		22.229.416.902	27,62	Sangat Rendah
1	Kecamatan	80.479.089.648		22.229.416.902	27,62	Sangat Rendah
VII	NON URUSAN	1.497.724.087.366		367.269.197.253	24,52	Sangat Rendah
1	Non Urusan	1.497.724.087.366		367.269.197.253	24,52	Sangat Rendah
	TOTAL	2.893.457.804.057		483.504.106.117	17,62	Sangat Rendah